

Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)

Herdi Sahrasad

Peneliti senior Pusat studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, dan Dosen ilmu sosial-politik Universitas Paramadina, Jakarta

Abstract: *The collapse of Soeharto's military regime in May 1998 and the subsequent rise of a civilian regime under Baharuddin Jusuf Habibie have been embraced as the beginning of a new era of reform (era reformasi) in Indonesia. It was hoped at the time that Habibie would reform the country's political system and initiate military reform, subjects which Soeharto had ignored for many decades. For this reason, radical students demanded that the new civilian regime consistently implement the demanded reforms, which included investigation and prosecution of Soeharto for his corruption, collusion, and nepotism, as well as the investigation and prosecution of the military on charges of human rights violations. They also called for peaceful solutions to be sought for separatist conflicts throughout the country.*

Kata Kunci: *praetorianisme, Orde Baru, militer, sipil, reformasi*

Pendahuluan

Perangai kekerasan oleh oknum TNI/Polri hingga era reformasi saat ini merupakan warisan praetorianisme Orde Baru, dimana ABRI didayagunakan sebagai alat kekuasaan yang begitu dominan dan represif. Praetorianisme merupakan konsep di mana militer menjadi pemegang kekuasaan dan pemerintahan negara secara eksekutif.² Tulisan ini mencoba menganalisis Orde Baru dan dampaknya pada reformasi TNI kurun 1999-2004, sebagai refleksi untuk bercermin dan melihat implikasinya atas relasi militer dan civil society masa kini.

Orde Baru Soeharto dengan “personal rule” yang amat dominan, telah menyeret institusi militer dan sipil ke dalam cengkeraman kekuasaan presiden, di mana otokrasi mendominasi sistem itu sendiri.

Michael Malley menyebut bahwa secara militer, administratif, legal dan finansial, pemerintahan Orde Baru Soeharto mencengkeram lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif di tangan sang penguasa, juga memberlakukan ketergantungan pemerintah daerah kepada pusat.¹ Kenyataan politik Indonesia di bawah Orde Baru Soeharto ditunjukkan dengan amat kuatnya peranan pemerintah dalam menentukan kebijakan dan menentukan jalannya negara serta keterlibatannya secara masif dalam kehidupan sosial dan ekonomi rakyat, yang berakibat pada menguatnya negara dan melemahnya masyarakat.

Dalam bahasa Karl D. Jackson, kepolitikan Orba Soeharto menimbulkan kejutan bahwa pemerintah yang memiliki 130 juta jiwa (kini penduduk Indonesia sudah lebih dari 240 juta jiwa) dapat bertahan tanpa ada partisipasi politik dari rakyatnya. Soeharto bisa berkuasa lebih lama dan lebih efektif dari pendahulunya, Soekarno, dengan

¹ Penulis berterimakasih kepada Darmawan Sinayangsah, Muntasir Alwi, Al Chaidar, Eko Dananjaya dan Hermendar atas bantuan pemikiran untuk esai ini. Baca, Michael Malley, “Daerah: Sentralisasi dan Perlawanan”, dalam Don Emmerson (ed.), *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 123.

mengendalikan sistem pemerintahan yang korup di tengah kemiskinan masyarakatnya. Bahkan Soeharto bertahan sedemikian lama di tengah negeri yang berpenduduk termiskin di dunia tersebut, dengan menerapkan personal rule yang amat dominan. Karl Jackson mencatat,

Often implicit in these accounts is a note of surprise that the government of a land of 130.000.000 persons can exist without mass political participation, that President Soeharto has ruled longer and more effectively than his charismatic predecessor President Soekarno, and that a system of government suffused with a much corruption can endure so long in the midst of one of the largest and poorest populations in the Third World.²

Soehartonomics Gagal

Di bawah Soeharto, sebagaimana ditunjukkan oleh J. Thomas Lindblad, kebijakan ekonomi (khususnya kebijakan industri dan pembangunan) untuk meningkatkan daya beli (purchasing power) dan kesejahteraan masyarakat

Indonesia lebih terfokus di Jawa. Wilayah Luar Jawa, meski baru diperhatikan pada akhir masa kekuasaan Soeharto, kurang menampakkan adanya keterkaitan antara perubahan demografis dengan kapasitas ekspornya. Artinya, sejarah ekonomi masa Orde Baru di bawah Soeharto adalah kelanjutan dan perubahan dari kebijakan ekonomi kolonial Belanda.

Namun, sebagaimana dicatat Richard Robison, bagaimanapun sejarah ekonomi Indonesia sudah memperlihatkan bahwa ekonomi yang dulu muncul karena eksploitasi berkepanjangan imperialisme Belanda, lalu karena upaya mobilisasi logistik perang Tentara Pendudukan Jepang dalam Perang Dunia II, selanjutnya karena Perang Kemerdekaan (1945-1949) yang disusul periode pergolakan politik 1949-1966 di mana modal swasta domestik (domestic private capital) gagal terbentuk meski telah mendapatkan sejumlah konsesi dari nasionalisasi perusahaan asing, maka praktis hanya sejak Pelita I (1969- 1974) Indonesia mulai mengalami stabilitas ekonomi dan selanjutnya mengupayakan adanya pembangunan yang digerakkan oleh dan untuk kepentingan kemakmuran bangsa Indonesia sendiri. Maka modernisasi pun terjadi di segala bidang dan transformasi masyarakat dari yang agraris ke masyarakat industrial pun terwujud di bawah komando Soeharto, dengan kebijakan ekonominya yang kemudian sering disebut para analis sebagai Soehartonomics. Pembangunan yang semula mengandalkan modal asing, oleh Soeharto mulai digeser dengan kebijakan-kebijakan kolusif, proteksi yang berlebihan dan nepotisme yang hendak memunculkan kaum pemodal domestik yang kuat dari kalangan militer, keluarga Cendana, kelompok Astra, Kelompok Liem, kelompok Soedarmo, kelompok Sultan Hamengku Buwono, dan kelompok Sutowo. Akibatnya, muncul benih-benih kolusi dan nepotisme di dalam pemerintahan Soeharto, selain korupsi yang sudah sejak awal sulit diberantas. Beberapa faktor utama yang bersifat politik inilah, selain ada beberapa faktor tambahan lainnya, sebagaimana dicatat Robison dan Ruth McVey³ yang menjadi penyebab munculnya krisis ekonomi Indonesia pada 1997 yang parah (deep crisis) setelah Indonesia mencapai beberapa dekade pertumbuhan dan

² Karl D Jackson, "Bureaucratic Polity: A Theoretical Framework for Analysis of Power and Communications in Indonesia", dalam Karl D. Jackson & Lucian W. Pye, *Political Power and Communications in Indonesia*, (Berkeley University of California Press, 1978), hal.3.

³ Lihat Ruth McVey (Ed.), *Southeast Asian Capitalists*, (SEAP Cornell University, 1992).

stabilitas ekonomi, serta pengurangan kemiskinan. Indonesia kemudian terpuruk dalam krisis ekonomi yang tragis dan berkepanjangan, sementara Malaysia (juga negara-negara Asia Tenggara lainnya), yang walaupun mengalami krisis ekonomi yang hampir sama dengan yang dialami Indonesia, namun Malaysia masih bisa bangkit dan keluar dari krisis.

Indonesia di bawah Soehartonomics ini, tidak dapat menghindari dari kenyataan bahwa rakyat harus kehilangan kebebasan untuk menguji ideologi- ideologi lain karena program modernisasi yang dicanangkan bersifat mono- litik, pragmatis, program oriented, dan menerapkan pola stabilitas keamanan yang ultra ketat. Namun, ada konsekuensi positif yang dihasilkan Soeharto karena berhasil membawa Indonesia menuju New Industrializing Countries (NICs) yang mencengangkan, meskipun Indonesia kemudian terjebak lagi ke lubang ketertinggalan dan kemiskinan. Di tengah situasi demikian itulah, kemudian ternyata demokrasi kita dilahirkan, tepatnya pasca Soeharto tahun 1998.

Pada masanya, Soeharto adalah pembangun negaranya sendiri dengan sikap yang “hati-hati mendekati demokrasi.” Dengan sikap ini, menurut Fachry Ali, berarti bahwa Presiden Soeharto berusaha menjauh sementara dari demokrasi, atau dapat juga disebutkan bahwa tokoh ini terlihat sangat “men- curigai” demokrasi sebagai konsep eksternal yang dipraktekkan secara luas oleh komunitas internasional dan mendekatinya dari sisi yang sama: menggunakan regimentasi untuk mengukuhkan institusi demokrasi namun tanpa nilai-nilai kebebasan berpendapat, tanpa pengakuan yuridis penuh terhadap hak-hak asasi manusia dan tidak memberikan kesempatan tumbuhnya otonomi bagi daerah-daerah perifer.⁴

Indonesia di era Soeharto sungguh tidak mentolerir kebebasan berpendapat. Masyarakat kedua negara membangun dan memodernisasi diri „tanpa kebebasan berpendapat“. Yang dimaksud dengan „tanpa kebebasan berpendapat“ di sini kurang lebih sama dengan “dominasi wacana”, atau “hegemoni makna”

meminjam bahasa Taufik Abdullah- untuk melihat fenomena sosi-alisasi wajib Pancasila melalui P4 di Indonesia. Fenomena ini sesungguhnya khas Asia Tenggara; artinya, fenomena ini tidak hanya ada di Indonesia, melainkan juga di Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina, Brunai dan bahkan Myanmar⁸. Tiadanya kebebasan berpendapat ini juga menjadi salah satu faktor maraknya demo-cracy, di mana kekerasan dijadikan kelompok tertentu sebagai bahasa ekspresi kekuasaan dan kebrutalan.

Oleh karena itu, dalam melihat gejala disilusi dan disintegrasi di kawasan- kawasan pinggiran seperti Aceh, Ambon dan Irian Jaya, tak ada salahnya menyiasati kembali strategi pembangunan nasional yang disentralisasi oleh Orde Baru, yang menimbulkan ketidakadilan dan ketegantungan daerah terhadap Pusat .

Kita tahu, Strategi Pembangunan yang sentralistik, yang telah dilaksanakan sejak berdirinya Orde Baru sampai saat ini adalah strategi pembangunan yang berlandaskan pemikiran neoklasik kuno yang menumpukkan pertumbuhan ekonomi sebagai fokus utama pembangunan yaitu memaksimalkan produksi nasional. Faktor sentral dalam strategi pembangunan ini ialah faktor modal dan teknologi. Berbagai bentuk rangsangan diberikan kepada kelompok yang paling dinamis di dalam masyarakat yaitu kelompok pengusaha untuk

⁴ Percakapan dengan pengamat politik Fachry Ali, di Jakarta awal Desember 2004.

melaksanakan proses produksi di mana faktor modal dan teknologi memegang peranan yang paling menentukan.

Pelaksanaan strategi pembangunan ini sama sekali tidak mempertimbangkan masalah-masalah sosial seperti partisipasi masyarakat, penyerapan tenaga kerja yang luas, kemiskinan, distribusi pendapatan dan kekayaan, dan dampak teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Juga strategi pembangunan ini sama sekali tidak mempertimbangkan kelembagaan masyarakat yang ada. Dalam hal ini kelembagaan masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang *given*. Pemikiran yang melandasi strategi pembangunan ini mempostulasikan bahwa di dalam masyarakat akan terjadi suatu proses yang harmonis yang akan menyebarkan manfaat pertumbuhan ekonomi ke seluruh strata masyarakat melalui apa yang disebut “mekanisme tetesan ke bawah” (*trickle down mechanism*). Mekanisme tetesan ke bawah dipercayai akan terjadi dalam situasi kelembagaan masyarakat yang ada, struktur sosial yang ada dan daya beli rakyat yang ada.

Ternyata pelaksanaan strategi pembangunan ini tidak menimbulkan tetesan ke bawah, melainkan justru tetesan ke atas (*trickle-up*) dan memperkuat sentralisasi oleh Pusat. Proses ekonomi Orde Baru ini kemudian ditandai dengan ciri yaitu yang kuat bertambah kuat dan yang lemah semakin lemah. Terjadilah proses eksploitasi. Terjadinya proses eksploitasi ini disebabkan etika moral ekonomi telah tidak menjadi landasan dalam hubungan dan landasan ekonomi. Terlihat dengan nyata bahwa sadar atau tidak sadar, kita telah didominasi oleh pemikiran ekonomi kapitalisme abad KE-19. ini terbukti dengan tumbuhnya secara kokoh kelas pemupuk rente ekonomi dalam ekonomi Indonesia. dan kelas pemupuk rente ekonomi ini pada umumnya adalah para konglomerat. Sistem kapitalisme abad ke-19 ini pada hakikatnya adalah sistem kapitalisme rampok yang merupakan sistem kapitalisme muda sesuai dengan definisi Sombart (Hatta, 1953)10.

Orde Soeharto memprioritaskan konglomerasi, tapi abai dalam membangun ekonomi kerakyatan, bahkan tidak peduli dengan *good governance*. Korupsi merajalela, Orde tidak peduli dengan pemikiran dan tindakan lanjutan dari generasi penerusnya di tengah centang perenang dan carut-marut sentralisasi pembangunan rezim Orde Soeharto. Sentralisasi itu gagal, dan disusul oleh desentralisasi yang banal di era rezim-rezim transisi pasca Soeharto dewasa ini.

Kalau dulu Hatta sangat berkepentingan dengan perluasan basis-basis produksi, pusat-pusat perkembangan ekonomi yang tersebar luas di daerah-daerah dan partisipasi-emansipasi rakyat dalam upaya pemberdayaan, maka Soeharto sebaliknya memilih jalan kapitalis yang oligopolis-monopolis.

Celakanya, sistem sentralisasi oleh Soeharto dan rezimnya tidak hanya terjadi di lapangan ekonomi, melainkan juga di bidang sosial-politik, hukum, kultural dan ideologi. Hegemonisme dan otokratisme yang luar biasa telah menyebabkan kawasan-kawasan kaya sumber daya alam di luar Jawa tak lebih dari wilayah eksploitasi dan dehumanisasi yang memicu disintegrasi.

Karena itu, hampir sebagian besar para pelaku tindak separatisme (disintegrasi) dan kekerasan di Ambon, Aceh, Papua dan Poso yang “sangat ekstrim” dewasa ini merupakan kelompok-kelompok masyarakat menengah ke bawah yang mengalami “ketidakadilan dan kekecewaan” akibat diskualifikasi, dislokasi dan deprivasi ekonomi politik. Beberapa isyarat dislokasi, diskualifikasi dan deprivasi itu antara lain: Pertama, diskualifikasi untuk memasuki lapangan kerja akibat faktor pendidikan yang rendah; Kedua, dislokasi sosial-ekonomi dalam

bentuk penyingkiran kaum miskin dari sumberdaya ekonomi, sosial dan kultural; dan Ketiga, deprivasi ekonomi- politik yang berupa proses pemiskinan masyarakat arus bawah akibat dominasi dan hegemoni kekuatan bisnis besar yang berkolusi dengan penguasa untuk menguasai sumber-sumber daya ekonomi dan politik. Semua itu berujung pada radikalisasi pribadi atau kelompok atas nama “keyakinan agama dan ideologi perubahan”, dengan tafsir “sempit, myopik dan sepihak”, yang secara keliru dan brutal justru disalahgunakan untuk melakukan perbuatan ekstrim berwajah kekerasan dan biadab, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah, yang membuat kota-kota rawan kekerasan. Dengan dukungan para dalang dan aktor intelektual di balik layar, aksi-aksi ekstremisme itu kemudian dilampiaskan, diledakkan dalam bentuk anarkisme, separatisme dan gerakan sentrifugalisme.

Penggumpalan dan pengerucutan sumber daya ekonomi-politik pada lapisan Sesudah 25 Tahun, pidato Dies Natalis Ke-9 Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 1970. Baca, Daulat Rakyat, No. 68 menengah ke atas telah membuat mayoritas yang miskin menjadi the silence majority, yang akibat keterpaksaan dan keterdesakan, serta dijustifikasi dengan tafsir “agama dan ideologi” yang “sempit, myopik dan sepihak” itu, akhirnya melakukan aksi kekerasan ekstrim berupa pemberontakan, anarkisme, peledakan bom, pelemparan granat dan aksi resistensi lainnya berdasar “pesanan halus dan berliku-liku” dari para oknum tertentu yang anarkis namun berduit. Dengan demikian, keresahan, ketidakpercayaan, kekacauan, kepanikan dan instabilitas terjadi untuk merusak dan memecah belah masyarakat dan “mengadudomba” antargolongan, antarumat beragama dan antaretnis agar tetap “baku konflik, baku bunuh” yang mendistorsi agenda reformasi, sementara lapisan elite di atas yang korupsi dan hidup mewah tetap jauh dari jeratan hukum, sehingga mudah “membeli waktu” (buying time) untuk mengelabui agenda reformasi itu sendiri.

Sentralisasi pembangunan oleh Orde Baru yang sarat KKN diwarnai dengan tingkat kesenjangan sosial yang ekstrem dan kemiskinan yang akut, dibarengi dengan disparitas (kesenjangan) sosial-kultural yang amat tajam antara kelas bermobil “Mercy, Jaguar, Ferrari, Range Rover dan sejenisnya” versus kelas “massa metromini dan pejalan kaki” paling miskin, telah menjadi “bahan bakar” untuk menyiram semangat dan praksis radikalisasi dan ekstremisasi kaum marginal yang dijustifikasi oleh ajaran agama untuk mengakhiri penindasan, namun dengan tafsir “sepihak, sepotong-potong, ekstrim dan oversimplifikasi”. Kejahatan sosial yang dilakukan oleh rezim Orde Baru, yang berlanjut hingga pemerintahan transisi demokrasi saat ini dalam bentuk korupsi, kolusi dan penyelewengan lainnya, yang terindikasikan dengan penyelewengan keuangan trilyunan rupiah, ditambah warisan Orde Baru berupa skandal BLBI Rp650 trilyun dan rekapitalisasi perbankan SEKITARRP140 trilyun, serta beban utang luar negeri (utang swasta dan negara) sekitar US\$150 milyar, telah menjadi “wacana ketidakadilan” (discourse of injustice) di masjid-masjid, warung kopi, keluarga buruh, petani kecil sampai sekolah inpres (sekolah rakyat) di pedesaan.

Angka-angka megaskandal itu di mata kaum miskin tak terbayangkan jumlahnya, sementara secara mikro kehidupan sekitar 40 juta pengangguran dan jutaan rakyat yang papa dan marginal, telah mendorong spirit keagamaan ke arah tafsir skriptural dan radikal, yang dalam bahasa akademisi Michael Walzer, situasi ini membuka ruang dan peluang bagi ekstremisme dan terorisme.

Dalam konteks nasional (makro), selama pemerintahan Orba nampak belum sungguh-sungguh memperjuangkan nasib rakyat sesuai amanat konstitusi. Sampai sejauh ini, sebagian

dari mereka yang marginal telah tertindas sejak zaman kolonial dan dalam zaman kemerdekaanpun mereka selalu terkena diskualifikasi, dislokasi sosial-ekonomi dan deprivasi ekonomi-politik setiap kali terjadi konsolidasi negara dan pemerintahan bagi “pembangunan” aki-bat tingkat pendidikan yang masih rendah dan ketrampilan yang minim yang menyebabkan kualitas sumberdaya manusia kelompok miskin ini tetap tak kompetitif. Sebagai kaum marginal yang terpentak, mereka menjadi para korban pembangunan, the victims of the victimized.

Padahal, demikian cendekiawan Nurcholish Madjid, merekalah mayoritas yang paling berkorban melawan penjajah sejak mereka datang ke bumi ini, dan di masa-masa merebut kemerdekaan dan mempertahankannya. Mereka adalah batu sudut bangunan Republik kita yang dilupakan oleh para pembangunnya sendiri (the corner stone of the house neglected by the builders). Karena itu, mereka tumbuh dengan gumpalan rasa kecewa yang membara, yang sewaktu-waktu dapat meledak dalam tindakan-tindakan kekerasan.

Celaknya, di bawah era Orba, terdapat sekitar 20-40JUTA orang dhuafa yang kecewa, frustrasi dan hidup di bawah garis kemiskinan. Dan meminjam diskursus post- strukturalisme, negara pembangunan Orde Baru telah melupakan apa yang disebut Giovanna Procacci dengan vulgar material, yakni kegiatan-kegiatan ekonomi kaum dhuafa yang mewakili kelompok-kelompok miskin, non-elite, perekonomian ala kadarnya, golongan kumuh, gelandangan, dan kaum melarat yang sejenisnya. Procacci menyatakan bahwa vulgar material merupakan suatu kenyataan yang bertolak belakang dengan ekonomi kaum elite dan kaya, noble material. Salah satu aspek terpenting dari vulgar material adalah pauperism yang didefinisikan sebagai kemiskinan yang sudah mencapai taraf membahayakan dalam pengertian menyekret individu kedalam suatu status yang sama sekali tidak terhormat dan di ambang kriminalitas.

Sementara itu, “permainan misterius dan struktur rahasia” dalam strategi pembangunan Orde Baru yang sentralistik, -meminjam diskursus Michael Serres- adalah refleksi “parasit ganas” dalam tubuh rezim monolitik ini, di- mana kaum birokrat, politisi dan kapitalis/kronisme yang rakus dan konglomerat/nepotis yang serakah, tak henti-hentinya menghisap setiap sumber daya ekonomi (uang rakyat, pajak, tanah, laut, gunung, mineral, minyak, ternak, hasil bumi), juga dari sumber daya manusianya (buruh, wanita, anak-anak) serta sumber daya produksi (pabrik, mesin, kantor, mobil). Mereka menghisap uang untuk memenuhi ambisi dan hasratnya yang tak terkendali bagi ekspansi bisnis dan perluasan kekuasaan. Kaum birokrat, politisi dan kapitalis kroni ini, meminjam wacana Serres,¹² bersikap libidinal, tidak peduli dengan jeritan-jeritan manusia yang tersisih; tidak ambil pusing dengan orang-orang yang terusir dan tergilas oleh mesin-mesin ekonomi yang panas. Mereka tidak peduli dengan rintihan-rintihan bumi yang tidak dapat lagi menanggungkan kepedihan akibat keserakahan manusia yang hawa nafsunya tidak dapat dikendalikan lagi. Mereka hanya memikirkankan kesenangan, kemakmuran dan kemewahan dirinya sendiri (hedonisme). Mereka tak lebih dari seekor cacing pita yang menghisap saripati makanan dari tubuh negara dan bangsa dan tidak menyumbang apa-apa bagi organisme tempat mereka hidup. Mereka bahkan tak lebih dari seekor nyamuk aedes aegypti yang menghisap darah dari tubuh bangsa dan negara, yang kemudian menebar berjuta penyakit (kemiskinan, kesenjangan sosial, keputusan, pemberontakan), dan yang dengan tanpa peduli melepaskan tanggung jawab

mereka, ketika kejahatan-kejahatan parasit yang mereka lakukan telah menggiring negara ini pada sebuah “kematian bangsa”, seperti krisis ekonomi krisis sosial, krisis moral, krisis kemanusiaan, dan krisis spiritual yang belum berakhir hingga kini.

Orde Baru Presiden Soeharto terus melayani modal asing dan menyeter ban- tuan dan fasilitas bagi konglomerat-konglomerat yang nyata-nyata terbukti menindas dan memiskinkan rakyat. Orde Baru terus mendukung konglo- merasi, seperti Carlos Menem di Argentina yang dikenal melakukan “Hood Robin policy” (kebalikan dari Robin Hood policy) yakni menghisap dan menguras uang rakyat untuk menyokong dan membayar utang konglomerat, dan perlahan telah diprediksi secara moral oleh kaum intelektual bahwa rezim ini akan mengalami krisis legitimasi. Orde Baru menolak melakukan “Robin Hood Policy” yakni menyita harta konglomerat hitam dan mendaya- gunakannya pada rakyat sehingga ekonomi rakyat bisa tegak bermartabat. Sentralisasi Orba telah sampai pada puncak kejatuhannya secara sengit dan pahit pada Revolusi Mei 1998.

Pada gilirannya, seperti dicatat Sritua Arief,¹³ perlu dikemukakan di sini bah- wa pelaksanaan ideologi liberalisasi perdagangan internasional di Indonesia yang disertai pula dengan liberalisasi arus investasi asing akan menimbulkan bertambahnya intensitas eksploitasi asing terhadap ekonomi rakyat Indo- nesia. Kekuatan ekonomi rakyat akan secara lebih parah tergeser dengan lebih luasnya aliran masuk investasi asing ke seluruh sektor ekonomi termasuk sektor usaha kecil dan menengah. rakyat Indonesia selain akan memasuki fase ketergantungan yang lebih dahsyat kepada pihak asing juga akan kembali secara sistematis menempati posisi budak di dalam negerinya sendiri. Ideologi kebangsaan dihancurkan oleh ideologi globalisasi. Gejala disintegrasi merupakan konsekuensi dari kompleksitas krisis ekonomi, politik dan moral Orde Baru yang sentripetal dan brutal.

Orba dan Sentralisasi Sektor Non-Ekonomi

Sebagaimana studi aktivis M. Fadjroel Rachman, Orde Baru merupakan ne- gara yang ditandai dengan ciri-ciri (1) Otokratisme dan patrimonialisme, di mana kekuasaan negara (state power) di tangan Presiden Soeharto yang di- dukung sepenuhnya oleh sistem militocracy¹⁴; (2) Rezim militocracy ini menggunakan aparat ideologis negara (ideological state apparatus) maupun aparat represif negara (repressive state apparatus) untuk mempertahankan kekuasaan; (3) Masyarakat madani (civil society) diakomodasi, dikooptasi dan direpresi secara korporatis- fasistis; (4) Pembangunan ekonomi dijadi-kan argumen legitimasi ideologis dan politis keberhasilan rezim Orde Baru sekaligus sumber finansial dan pembiayaan kelangsungan rezim yang ber- kuasa; (5) Pendekatan birokratis dan teknokratis menjadi ujung tombak ideologi pembangunan, sembari memberangus pendekatan demokratis.

Ideologi Orde Baru adalah developmentalisme dengan penekanan pada efi- siensi, efektifitas dan pragmatisme ekonomi-politik. Dalam melaksanakan developmentalisme itu, militer memegang kendali stabilitas dan keaman-an, sementara kaum teknokrat dan intelektual sekuler menjalankan fungsi dan peran teknokrasi kehidupan dengan orientasi pertumbuhan dan pem- bangunan ekonomi, guna mewujudkan sebuah masyarakat yang adil dan makmur. Sebagaimana dicatat oleh Mohtar Mas“oed dan James Schiller,

Despite their demise, the modernisation values they had propagated for so long were kept alive among the New Order elite, largely due to the activities of the intellectuals of the 'reformlater' sort still in the system. The developmental ideology was further

developed by civilian intellectuals around General Ali Murtopo. This revised developmental ideology still retained the characteristic values of economic development, rational public policy-making, efficiency, effectiveness and pragmatism. But the new version contained a heavy dose of order. This emphasis was found in the political statements of many New Order leaders, but the most blatant version was embodied in the writings of Ali Murtopo¹⁵, summary, by the end of the 1960s there had developed an ideology justifying political sacrifices for the sake of economic development.

The two objectives of the New Order considered by the leaders to be most important were economic growth and political stability. Despite the contention that the New Order was committed to establishing a 'just and prosperous society', which was taken to mean that economic growth should be accompanied by equal distribution, this was qualified. As James Schiller comments,¹⁶ if there must be a choice between justice and growth there is considerable evidence from elite statements about development that economic growth has priority. Ali Murtopo writes that: "The main target is to increase the GNP threefold in 25 years time" . . . Moh. Sadli writes that "the major preoccupation of the new government became directed to making the national pie bigger, at least as a first priority". Widjojo Nitisastro argues that "more equal development requires economic growth so that what is distributed is far larger". Economic growth may be only an instrumental goal but it is clearly emphasised as a crucial one in elite statements on development.. Soeharto describes stability, order and security as "an object of development itself, namely, to make us all feel physically secure and have peace of mind, free from fear of threats from without and free from worrying over disturbance from within". One of the most important aims of the New Order, he says, is "to build a new society which feels secure, enjoys the significance of order, [and] pursues progress in an atmosphere of stability".

Menurut Mohtar Mas'ood, guna membenarkan pilihan developmentalisme itu, juga untuk memobilisasi dukungan rakyat, para pejabat dan penguasa Orba menekankan komitmen Orde Baru bagi pembangunan untuk meyakini dan mempercayai nilai-nilai dalam mana Presiden Soeharto naik ke tangga kekuasaan, yang sangat penting bagi keamanan nasional dalam mewujudkan dan memenuhi aspirasi kemerdekaan bagi kehidupan rakyat luas yang lebih baik,

- (1) as being faithful to the initial values with which the Soeharto government came to power;
- (2) as necessary to overcome the richpoor nation gap;
- (3) as the appropriate-goal for this era;
- (4) as essential to Indonesia's security;
- (5) as fulfilling the aspirations of independence and
- (6) as providing an opportunity for a better life.

Dalam kenyataannya, kemudian kita menyaksikan bahwa stabilitas nasional dan keamanan nasional merupakan satu hal paling bernilai dalam pandangan para elite Orde Baru Presiden Soeharto. Penguasa Orba itu berusaha mewujudkan developmentalisme itu dengan menciptakan politik yang bebas dari konflik dan berdasarkan konsensus, penyederhanaan partai-partai politik dan depolitisasi, membatasi partisipasi politik yang pluralistis serta mengarahkan partisipasi rakyat pada program pembangunan yang diadopsi para elite politik Orba:

(1) Create a politics free from ideological conflict and based on consensus. This measure resulted in government efforts to eliminate party politics, to the emasculation of the political parties and representative bodies, and to impose "consensual politics".

(2) Limit pluralistic political participation. Popular participation should be directed primarily toward the implementation of the development programmes adopted by the political elite.

Dengan pendekatan keamanan, cara-cara kooptasi, koersi dan represi, Orde Baru yang militeristik dengan Dwi Fungsi ABRI-nya, memperkuat sentralisasi kehidupan sosial-politik dan kebudayaan. Sentralisasi dan korporatisasi negara dilakukan secara masif yang mencakup kalangan pengusaha, pekerja dan profesional seperti pembentukan PWI untuk mengendalikan wartawan, KADIN untuk mengontrol kalangan pengusaha, bahkan KNPI untuk mengkooptasi pemuda, juga HKTI untuk mengontrol petani, KOWANI untuk mengendalikan kaum wanita dan Majelis Ulama Indonesia untuk mengendalikan ulama dan seterusnya. Pendek kata, hampir tidak ada ruang publik bagi masyarakat madani untuk bergerak dan berkiprah membangun demokrasi dalam upaya membentuk nation and character building, sebab state building amat menonjol dengan tekanan pada koersi dan kooptasi.

Buah dari sentralisasi ini adalah meluasnya KKNK (korupsi, kolusi, nepotisme, kronisme) yang mencapai puncaknya pada 1990-an dan menjadi ledakan frustrasi sosial yang ditandai dengan pengusuran kekuasaan Presiden Soeharto Mei 1998 setelah keadaan ekonomi memburuk dan krisis politik meletup, yang merontokkan bangunan kardus developmentalisme Orba Presiden Soeharto. Gejolak dan krisis sosial meledak di berbagai kawasan: Aceh, Papua, Ambon, Maluku, Poso, Kalimantan Tengah dan seterusnya. Sebab-sebabnya amat kompleks, mencakup krisis identitas, masalah SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan), yang pada intinya mencerminkan krisis nasionalisme lanjut dan krisis moral-religiusitas yang bertali-tali akibat ketidakadilan dan dehumanisasi oleh otoriterisme Orba di masa lalu.

Reformasi dan Isu Korupsi

Sebelum penguasa Orde Baru (Orba) Soeharto jatuh pada 21 Mei 1998, sejarah Indonesia mencatat peristiwa 12 Mei 1998 di mana beberapa mahasiswa Trisakti, yaitu Hendrawan Sie dan sahabat-sahabat seperjuangannya menjadi korban kebengisan rezim Orba. Peristiwa Trisakti itu kemudian diikuti dengan tragedi 13-15 Mei 1998. Kerusuhan sosial dan penjarahan terjadi di mana-mana. 19 Rentetan tragedi itulah kemudian yang mendorong munculnya reformasi 1998. Saldi Isra (2003) berargumen, peristiwa 21 Mei 1998 berhasil menjadi garis pemisah yang tegas antara upaya melengserkan rezim Orba dan perjuangan melakukan perubahan mendasar dalam proses penyelenggaraan negara.

Khusus upaya pertama dapat dikatakan sebagai titik klimaks resistensi mahasiswa terhadap Soeharto. Bila hal itu dianggap sebagai periode awal, keberhasilannya sangat kentara, yaitu pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Indonesia.

Namun demikian pengunduran Soeharto itu (step aside) tidak otomatis diikuti dengan runtuhnya sistem ekonomi-politik yang dibangunnya. Sejak 22 Mei 1999 sampai dewasa ini, kaum oligarki Soeharto masih menguasai lanskap ekonomi-politik Indonesia. Banyak kalangan waktu itu berkeyakinan, kesuksesan pada periode pembukaan itu tidak akan berarti apa-apa jika semua komponen yang terlibat dalam usaha mengakhiri kekuasaan Soeharto tidak mampu melakukan perubahan progresif. Oleh karena itu, berbagai elemen pro-reformasi merumuskan dan menyepakati enam agenda utama yang harus

ditunaikan. Pertama, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kedua, penegakan supremasi hukum. Ketiga, penghapusan dwifungsi ABRI. Keempat, amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Kelima, otonomi daerah. Keenam, demokratisasi kehidupan politik.

Dari keenam poin yang menjadi agenda reformasi itu, tidak semua telah terwujud. Minimal ada tiga hal yang masih perlu kita refleksikan bersama. Pertama, supremasi atau penegakan hukum. Dalam konteks kekinian, hukum masih lebih berpihak kepada uang, kekuasaan, dan koneksi. Hukum di tanah air belum berpihak kepada masyarakat marginal, sebab penegakan hukum sampai saat ini masih cenderung berpihak kepada pihak yang punya dana.

Kedua, korupsi masih terjadi di mana-mana. Korupsi yang telah menjadi amanat pertama reformasi ternyata masih mengandung berbagai problem krusial yang belum terselesaikan secara sempurna. Bahkan hingga saat ini, korupsi masih tetap merajalela dan melampaui batas-batas kewajaran. Bung Hatta pernah menyatakan, korupsi telah menjadi budaya yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Mulai dari persoalan kecil di keluarga hingga ke institusi besar bernama negara.²⁰

Merajalelanya korupsi telah menjadi kecemasan dan keprihatinan sosial bahwa reformasi telah dibajak oleh para oknum dan elite yang tidak bertanggung jawab. Dan ini merusak citra reformasi yang diusung oleh gerakan mahasiswa dan civil society.

Dewasa ini banyak elite politik busuk hidup di atas penderitaan masyarakat bawah. Korupsi kemudian bermetamorfosa dari sesuatu yang haram dilakukannya menjadi niscaya dikerjakan. Ia tidak mengenal siapa, di mana dan berapa banyak uang yang bisa dikorupsi. Padahal sebagaimana dielaborasi oleh Lawrence E Harrison dalam *Culture Matters*, budaya korupsi yang berurat berakar itu merupakan penyebab dominan dari keterbelakangan kehidupan sebuah bangsa. Dalam konteks kekinian, alih-alih dapat dibetulkan, praktik korupsi semakin meluas jaringannya, baik secara kualitas ataupun kuantitas. Korupsi telah memasuki sendi-sendi kehidupan berbangsa sampai yang paling pribadi. Ironisnya, belakangan ini kasus korupsi terjadi di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Bank Mandiri, Bank Century dan seterusnya.

Dalam kasus korupsi di tubuh KPU, berawal dari terbongkarnya penyuapan yang dilakukan oleh salah satu anggota KPU, Mulyana W Kusumah kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Khairiansyah Salman, lalu kasus itu terkuaklah. Kasus penyuapan itu didasarkan atas perintah lisan ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin. KPU sebagai lembaga demokrasi yang seja-tinya steril dari penyimpangan harus terjebak dalam lubang hitam penuh noda. Cita-cita dan harapan bangsa Indonesia yang diamanatkan kepada KPU berakhir dengan cibiran bahkan cacian. Korupsi yang terus merajalela itu memaksa kita untuk menyikapi korupsi sebagai perbuatan yang harus diperangi secara kolektif. Dalam kasus korupsi berat harus diposisikan bahwa si koruptor itu sama halnya dengan pelaku kejahatan hak-hak asasi manusia (HAM) yang harus diadili dan dihukum berat.

Perang melawan korupsi dengan demikian menjadi keniscayaan yang selalu mendesak untuk direalisasikan. Di samping merupakan amanat reformasi, juga korupsi telah membuat banyak orang menderita. Artinya, wacana pemberantasan korupsi dipersiapkan untuk praksis.

Ketiga, ancaman terhadap demokrasi. Harus diakui kehidupan politik Indonesia tergolong demokratis. Indikatornya adalah dilaksanakannya pemilihan umum (pemilu)

secara demokratis pada 1999 dan 2004. Bahkan untuk yang disebutkan terakhir, pemilu dilaksanakan dengan langsung pertama kalinya. Dengan dua indikator ini, kehidupan politik nasional tergolong sangat demokratis.

Namun kehidupan demokrasi politik nasional mulai digugat karena dua alasan. Pertama, kasus korupsi di KPU. Sementara KPU adalah wasit sekaligus tiang penyangga proses demokrasi tersebut. Lembaga independen ini yang mempersiapkan, menyelenggarakan dan menghitung hasil pemungutan suara konstituen. Kalau jajaran KPU saja nekat menjarah dana pemilu, bukanlah hal yang mustahil bila mereka memanipulasi hasil penghitungan suara konstituen dalam pemilu tersebut. Belum lagi ditambah dengan kompromi petisi tidak sehat bermodal politik uang.

Kedua, ancaman kematian kebebasan pers. Dalilnya adalah kasus yang menimpa dua wartawan Koridor, yaitu Pemimpin Redaksi Darwin Ruslinur dan Redaktur Pelaksana Budiono Syahputro yang divonis sembilan bulan penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena dianggap mencemarkan nama baik Ketua Tim Kampanye Partai Golkar, Alzier Dianis Thabranie, dan Wakilnya, Indra Karyadi. Kasus ini merupakan contoh kecil dari mulai terancamnya kebebasan pers.

Sudah menjadi rahasia umum pasca Soeharto, demokratisasi yang diusung gerakan reformasi secara sistemik berkaitan erat dengan keberadaan pers dan kontrol sosial dari masyarakat. Kebebasan pers menjadi salah satu tolok ukur dan prinsip tegaknya proses demokrasi. Sedangkan kontrol sosial dari civil society merupakan kekuatan pengimbang, check and balances terhadap distorsi dan kemandulan institusi-institusi.

Hubungan Sipil-Militer

Sejak mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, seiring runtuhnya rezim Orde Baru, runtuh pula dominasi militer dalam politik di Indonesia. Di era transisi dari sistem otoriter ke demokrasi yang sedang berjalan ini, tak sedikit kritik atau hujatan terhadap ABRI atau TNI atas peran yang dilakukannya selama 32 tahun berkuasanya rezim Soeharto atau rezim Orde Baru. Kritik tersebut sebagian besar bermuara pada tuntutan agar ABRI/TNI menanggalkan Dwifungsinya, kembali ke tangsi atau barak, dan hanya memainkan peran sebagai alat pertahanan negara dari ancaman luar.

Di tengah kritik yang datang dari dalam dan luar ABRI/TNI tersebut, pada pertengahan 1998 ABRI di bawah pimpinan Pangab/Menhan Wiranto melontarkan redefinisi, reposisi dan reaktualisasi peran ABRI/TNI dalam kehidupan bangsa. Ini merupakan salah satu wujud reformasi internal ABRI/TNI. Di antara reformasi internal tersebut, tercakup empat paradigma baru ABRI/TNI, yaitu pertama, ABRI akan berusaha mengubah posisi dan metode tidak harus selalu di depan; kedua, ABRI mengubah konsep dari menduduki menjadi mempengaruhi; ketiga, ABRI ingin mengubah cara-cara mempengaruhi dari secara langsung menjadi tidak langsung; dan keempat, ABRI bersedia melakukan role sharing (kebersamaan dalam pengambilan keputusan penting kenegaraan dan pemerintahan) dengan komponen bangsa lainnya (mitra nonmiliter).

Meski begitu, Ikrar Nusa Bhakti, seorang pengamat militer LIPI berpendapat, secara kritis melihat reformasi internal era Menhan/pangab Wiranto tersebut masih tampak bersifat kosmetik belaka dan belum mencakup substansinya. Tidak mengherankan bila hasil penelitian YIPIKA/LIPI yang mengkaji posisi ABRI dalam gerakan reformasi yang diterbitkan Mizan pada 1999 dengan judul *Tentara yang Gelisah*, masih menyebut reformasi

internal TNI tersebut sebagai “Reformasi Setengah Hati”. Para akademisi masih melihat reformasi militer di bawah Wiranto belumlah komprehensif karena berbagai kendala dan persoalan yang mengitarinya.

Setidaknya, mesti diakui, untuk mengubah posisi, peran dan tingkah laku personel ABRI/TNI dari paradigma lama ke paradigma baru, bukanlah pekerjaan mudah seperti membalik telapak tangan. Berbagai doktrin militer dan politik yang mereka kunyah melalui pendidikan formal, kursus dan pelatihan di lingkungan ABRI, tentunya telah terinternalisasi dan melekat di hati sanubari para personel TNI, baik dari tingkatan tamtama, bintara, perwira pertama, perwira menengah, sampai ke perwira tinggi. Karena itu, mengubah kultur personel TNI membutuhkan tenggang waktu dan tahapan yang cukup lama. Ini akan ditentukan bukan saja oleh kalangan internal TNI, tetapi juga oleh lingkungan luarnya, baik sistem hukum dan per-undang-undangan, sistem politik, kultur elite politik dan massa.

Di era Wiranto (kepresidenan BJ Habibie), masih terdapat perdebatan pemi- kiran mengenai hubungan baru sipil-militer bukan saja antara para penga- mat sosial-politik sipil dan kalangan militer, tetapi juga antara militer pemikir (military thinkers) dan para perwira militer lapangan (field officers). Hal yang lebih menarik, tidak sedikit perwira lapangan yang dulu dapat dikategorikan sebagai militer reformis, begitu memiliki jabatan struktural dalam TNI-AD, khususnya yang berkaitan dengan peran teritorial TNI-AD, justru masih berpikiran status quo, jika dibandingkan dengan para pemikir TNI-AD yang dulu dikategorikan sebagai perwira tinggi yang “ragu-ragu”.

Definisi Hubungan Sipil-Militer

Sebelum kita membahas hubungan baru sipil-militer di Indonesia, ada baik- nya kita mendefinisikan terlebih dahulu apa itu “hubungan sipil-militer”. Secara umum, di negara-negara Barat terdapat model hubungan sipil-militer yang menekankan “supremasi sipil atas militer” (civilian supremacy upon the military) atau militer adalah subordinat dari pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum. Model ini juga banyak dianut oleh negara-negara berkembang yang menganut sistem demokrasi liberal, khususnya di negara-negara yang menganut sistem Westminster Inggris dengan 26 berbagai modifikasinya.

Namun demikian, di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, di- kotomi sipil-militer tersebut dianggap oleh kalangan militer atau kalangan sipil yang tak mau berkonfrontasi dengan militer, kurang menggambarkan realitas yang sesungguhnya ada. Dan karena itu lebih menonjolkan adanya “kerjasama”, “hubungan kemitraan” atau “harmoni/keselarasan” antara sipil dan militer. Dalam model tersebut, dapat saja terjadi militer merupakan the first among equals (pertama di antara yang sederajat) dalam hubung-annya dengan institusi-institusi sipil. Ini khususnya terjadi apabila mitra sipilnya

Ikrar Nusa Bhakti, “Hubungan Baru Sipil-Militer.” 26 Ikrar Nusa Bhakti, “Hubungan Baru Sipil-Militer.” 27 Ikrar Nusa Bhakti, “Hubungan Baru Sipil-Militer.” amat lemah. Namun bila institusi-institusi sipil cukup kuat, muncul-lah gagasan dari militer untuk melakukan “pembagian peran” (role sharing), seperti yang tampak dari butir keempat Paradigma Baru ABRI/TNI tersebut. Lebih jauh lagi, militer tidak memandang demokrasi dalam hubungan vertikal antara sipil dan militer, seperti tercermin dalam konsep “supremasi sipil”, tetapi cenderung pada pola “hubungan yang setara” (equal relation-ship). 28

Bahkan secara khusus, TNI-AD, melalui buku saku Visi, Misi dan Strategi Staf Umum Teritorial TNI-AD merasa perlu untuk meluruskan kembali pengertian supremasi sipil menjadi supremasi rakyat karena UUD 1945 menganut asas supremasi rakyat, yang dirumuskan sebagai kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi hakikat dari supremasi sipil dalam Demokrasi Indonesia adalah supremasi Rakyat.

Dalam pandangan Ikrar Nusa bhakti, hal ini menunjukkan bahwa TNI-AD bukan saja “alergi” dengan rangkaian kata “supremasi sipil”, melainkan juga sejalan dengan pandangan Seskoad yang selalu menyebut “sipil” dengan kata “non-ABRI”. Secara teoretis, militer cenderung memainkan peranan penting (di luar bidang pertahanan) yang tidak proporsional di negara-negara se-dang berkembang disebabkan oleh faktor-faktor internal (endogenous) dan eksternal (exogenous) seperti adanya kelompok-kelompok dalam masya- rakat yang mengancam militer; persepsi korps perwira atas kebutuhan untuk memperoleh kekuasaan politik yang meningkat dalam masyarakat; kelemah- an-kelemahan politik dari kepemimpinan sipil yang membuka kesempatan bagi militer untuk intervensi dalam politik nasional.

Ihwal Peran Militer

Peran Angkatan Bersenjata di negara berkembang merupakan suatu kenya- taan, realitas politik. Untuk sebagian, hal ini dikarenakan lembaga-lembaga yang dipimpin oleh sipil mengalami krisis kepemimpinan atau kelemahan yang serius. Di kalangan sipil sering terjadi konflik yang bersifat jamak; dari soal perbedaan pandangan baik itu dalam bentuk perbedaan ideologi mau- pun perbedaan latar belakang sosial-kultural, maupun perbedaan kelas.

Acap kali hal ini mengakibatkan konflik yang berkepanjangan dan berdam- pak pada stabilitas ekonomi dan politik. Apabila hal-hal semacam ini terjadi maka pihak militer memiliki peluang untuk mengambil alih kepemimpinan sipil dengan dalih mempersatukan negara atau menyelamatkan konstitusi dan bangsa. Pada dasarnya kelebihan organisasi militer adalah lebih kepada faktor disiplin dan terorganisir. Militer dapat berdiri di atas semua golongan, berpandangan modern dan berupaya menciptakan stabilitas politik yang pada akhirnya merangsang pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi militer memiliki kelemahan karena apabila mereka berkuasa, cenderung bersikap otoriter- totaliter, mengabaikan HAM dan cenderung untuk melakukan ko-rupsi- kolusi.

Namun hal ini bisa dikurangi atau dikikis apabila terjadi proses demo- kratisasi. Sebenarnya militer dapat memainkan peran pada masa menuju transisi menuju negara demokrasi, untuk sebagian hal ini terjadi karena sipil memerlukan waktu untuk belajar demokrasi. Diperlukan waktu cukup lama untuk menumbuhkan kelas menengah yang kuat, ekonomi yang stabil, serta golongan terdidik sebagai kelompok penyanggah demokrasi. Apabila tidak ada kelas menengah dan pertumbuhan ekonomi masih kecil, maka yang terjadi adalah demokrasi yang hanya mementingkan “perut” kelompok atau individu, tanpa dibarengi komitmen dan cara berfikir yang rasional sehingga perbedaan pendapat dan kepentingan tidak dapat dengan jemih dipecahkan.

Hal ini terjadi di Indonesia Orde Baru ketika sipil berdebat tentang konsep- konsep pembangunan maka militer memainkan peran dalam menjaga stabi- litas politik. Ada beberapa teori yang mencoba untuk menganalisis hubung-an sipil dan militer di antaranya:

Hubungan sipil dan militer yang baik adalah jika militer berada dalam bidang yang sesuai dengan profesinya (pertahanan) dan sebaliknya bila militer diluar bidangnya dianggap tidak

profesional. Sementara itu sipil harus melakukan kontrol obyektif terhadap angkatan bersenjata.³⁰ Menurut Samuel Huntington persoalan hubungan sipil militer di masa depan di negara demokrasi yang baru bukan berasal dari pihak militer tetapi berasal dari pihak sipil.

Sementara itu Ulf Sundhaussen mengatakan pemerintahan sipil di negara- negara berkembang boleh dikatakan tidak dipermasalahakan atas kejadian intervensi militer bila timbul rasa tidak puas mengenai kondisi kedi- nasannya. Persoalan muncul, demikian Larry Diamond, bila pemerintahan yang demokratis gagal di bidang ekonomi dan menjaga keamanan serta institusi politik yang ada lemah atau membusuk.

Selain itu, seperti diungkapkan oleh Nordlinger, kaum militer praetorian menggambarkan dirinya sebagai perwira-perwira yang bertanggung jawab dan berjiwa patriotik yang mengintervensi masalah-masalah sipil karena tanggung jawabnya kepada konstitusi dan negara.

Alasan militer mengambil alih kekuasaan dari kelompok sipil antara lain ialah, bahwa prinsip-prinsip konstitusional telah dilanggar oleh pemerintah sipil yang korup, sewenang-wenang, dan melanggar hukum; bahwa tindak- an- tindakan pemerintah sipil bertentangan dengan kepentingan nasional yaitu dengan membiarkan kelompok-kelompok subversif untuk mengancam keamanan internal negara, dengan menggerakkan konflik-konflik kelas dan komunal; dan karena itu mendorong ketidakaturan politik dan kekerasan, dengan mengadopsi kebijakan-kebijakan yang menghasilkan tingkat per- tumbuhan ekonomi yang rendah, pengangguran yang meluas dan lonjakan inflasi, atau dengan kegagalan untuk mengambil program-program modern- isasi sosial ekonomi dan reformasi.

Pada saat yang sama, para perwira pretorian ini secara yakin menegaskan bahwa mereka akan memulihkan negara menuju keadaan ekonomi dan politik yang sehat. Mereka merasa mampu karena korps perwira ini memiliki jiwa patriotik yang tinggi, jauh dari kelemahan-kelemahan sipil, dan memiliki keterampilan yang tinggi di bidang teknik dan manajerial. Selain itu, mereka juga akan menghapuskan korupsi, melenyapkan akar-akar subversif, mengekang ketidakaturan politik, membangkitkan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi inflasi ekonomi. Para perwira militer ini merasa dirinya sebagai “juru selamat” negara. Biasanya, para perwira militer ini mengumumkan keinginannya untuk menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pemerintah sipil yang terpilih secara demokratis dalam waktu dekat atau jauh.

Merujuk pada teori Nordlinger ini, rezim Orde Baru dapat dikategorikan ke dalam ruler-type praetorians yang bukan saja mengontrol pemerintahan, melainkan juga mendominasi rezim, dan obyektif ekonomi dan politiknya sangat ambisius. Rezim Orde Baru berupaya untuk memobilisasi populasi dengan menciptakan partai-partai massa dengan Golkar sebagai partai yang dominan yang berada di bawah kontrol militer. Politik, ekonomi dan masyarakat dipenetrasi dari atas.

Teori praetorianisme Nordlinger tersebut kini sudah dapat dipatahkan melalui asumsi bahwa militer bukanlah institusi yang dapat menilai berhasil atau gagal suatu pemerintahan sipil. Rakyatlah yang menentukan diberikan atau tidaknya dukungan dan legitimasi terhadap pemerintahan sipil. Sebuah pemerintahan sipil dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya di par-lemen, seperti di negara-negara yang menganut demokrasi parlementer, atau melalui pemilihan umum karena kehilangan legitimasinya di mata rakyat seperti dalam sistem parlementer atau presidensiil.

Di Indonesia, sejarah ABRI dimulai dengan masuknya bekas KNIL ke dalam tubuh BKR di antaranya adalah Soeharto yang pernah dididik dan aktif di KNIL begitu pula Kol. Urip Sumodiharjo yang ketika itu diangkat menjadi Kepala Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR merupakan cikal bakal TNI. KNIL diciptakan oleh pemerintahan kolonial di Indonesia berfungsi sebagai alat represif untuk menekan rakyat, disamping itu juga sebagai alat untuk menumpas berbagai pemberontakan di Indonesia sehingga secara ideologis KNIL memahami bagaimana cara mengeksploitasi rakyat dan sumber daya Indonesia untuk kepentingan kaum kapitalis Internasional.

Pada masa yang berikutnya, era pasca kolonial, (pemerintahan Soeharto di era Orde Baru dengan pengalaman sebagai KNIL) memodifikasi sistem ini, untuk kepentingan kekuasaan dan bisnisnya memanfaatkan sistem birokrasi dagang VOC pada masa pemerintahan kolonial Belanda, untuk mengoperasionalkan sistem birokrasi di Indonesia. Disamping itu birokrasi era Orde Soekarno, sang presiden RI pertama, juga sempat mengadopsi sistem pemerintahan kolonial Jepang dalam melakukan propaganda dan pembinaan para pemuda gaya Heiho karena pada masa pemerintahan Jepang Soeharto pernah aktif di Heiho (yang disebut sebagai state qua state, meminjam wacana Benedict ROG Anderson).

Soeharto pernah dekat dengan kalangan partai Murba sebuah partai yang didirikan oleh Tan Malaka yang beraliran kiri. Ia dekat dengan Adam Malik yang ketika Soeharto menjadi presiden pada tahun 1967 diangkat menjadi menteri Luar Negeri. Kedekatan Soeharto dengan kelompok kiri bisa dilihat dari kedekatannya dengan Letnan kolonel Untung, tokoh PKI dari Angkatan Darat. Kolonel Untung adalah anak buah Soeharto pada masa Soeharto menjadi Pangdam Diponegoro. Soeharto ditarik ke Jakarta karena terbukti melakukan penyelundupan bersama rekan bisnisnya, sehingga ia oleh Jenderal TNI Ahmad Yani dikenakan sanksi yang membuat Soeharto den-dam terhadap Jenderal Ahmad Yani. Sebagaimana dicatat oleh Ben Anderson, Ruth Mc Vey (dikenal sebagai "Cornell Papers") dan para akademisi lainnya, Peristiwa G 30.S.PKI merupakan persengkongkolan politik oknum kelompok kiri bersama dengan oknum bersama TNI-AD dengan memanfaatkan situasi politik pada waktu itu untuk mengakhiri pemerintahan Soekarno.

Soeharto sebenarnya dekat dengan Syam Kamrulzaman agen ganda CIA dan Soviet yang menduduki jabatan biro khusus PKI. Masing-masing elite politik pada waktu itu memiliki skenario dan agenda politiknya masing-masing kelompok PKI masing-masing memiliki skenario yang berbeda.

Situasi ini bertambah rumit ketika faktor internal dan eksternal memperkeruh situasi yang merupakan tangan kiri Soekarno sudah tidak sabar untuk merebut kekuasaan dengan menciptakan isu adanya Dewan Jenderal dan melakukan manuver politik dengan melakukan provokasi Soekarno untuk mempersenjatai kaum buruh dan petani. PKI pada waktu itu mengistilahkan situasi saat itu sebagai Indonesia yang tengah hamil tua. Sebelum melakukan kondisi-kondisi semacam ini PKI menghasut Soekarno untuk membubarkan lawan politiknya, terbukti dengan Soekarno membubarkan PSI dan Masyumi. Para aktivis Masyumi di era reformasi sebagian mendirikan PAN dan Partai Bulan Bintang.

Persaingan PKI dengan TNI sengaja diciptakan oleh Soekarno untuk mendukung kekuasaannya. Soekarno bagaikan kusir mengendalikan dua kuda yang sedang berlari kencang. Yang mana kedua kuda tersebut saling bertabrakan sehingga membuat Soekarno

terjungkal. „Kuda“ PKI mati tersungkur sementara „Kuda“ TNI AD terus berlari dan berpacu mengejar cita-cita. Setelah Soeharto merebut kekuasaan ia melakukan pembenahan politik. Pembenahan politik itu di antaranya melibatkan teknokrat/ekonom UI, kader-kader dari Masyumi (HMI) dan kader-kader PSI dan PNI yang digalang dan dimandori para jenderal-jenderal purnawirawan. Sebelumnya para jenderal-jenderal purnawirawan ini mendirikan organisasi SOKSI, KOSGORO dan MKGR yang ketuanya waktu itu masing-masing: Suhardiman (SOKSI), Mas Isman (KOSGORO) dan Sugandi (MKGR), mereka inilah yang membentuk sekber GOLKAR untuk menggalang masa yang menandingi kelompok PKI.

Soekarno sadar bahwa kegagalan demokrasi parlementer diakibatkan karena ketiadaan kepemimpinan yang kuat sehingga kabinet jatuh bangun hanya berumur kurang dari satu tahun. Dengan mengadopsi “Dwi Fungsi ABRI” dari idenya Jenderal A.H. Nasution yang pada masa orde lama bersama Soekarno mendukung Dekrit Presiden untuk mengakhiri sistem parlementer. Sistem parlementer dipandang gagal, kegagalan ini disebabkan poli-tisi sipil gagal menciptakan pemerintahan yang solid yang dapat mengemban amanat penderitaan rakyat karena para politisi sipil asyik berdebat di parlemen dan saling memberikan opsi tidak percaya terhadap kabinet yang sedang menjalankan pemerintahan. Yang kita ketahui pada waktu itu koalisi parati- partai besar seperti PNI, Masyumi, NU, PKI, jatuh bangun muali dari kabinet Natsir (Masyumi), Wilopo (PNI), sampai kabinet kelompok Teknok-rat seperti Ir. Juanda terjungkal karena mosi tidak percaya dari kelompok oposisi. Oleh karena itu hingga kini sistem oposisi di Indonesia menjadi tabu mengingat pada masa lalu sistem ini cenderung menciptakan konflik.

Kembali pada ide “dwi fungsi ABRI” yang merupakan ide dari Jenderal A.H. Nasution sebenarnya pada waktu itu muncul sebagai “jalan tengah” dari konflik antara Angkatan Darat dengan Soekarno. Jalan tengah ini memung- kinkan militer aktif dalam politik. Yang pada akhimya aktifitas ini menjadi kekuatan yang dominan di era Orde Baru. Pengalaman perwira tinggi TNI AD dalam menjalankan bisnis ketika mengambil alih perusahaan-perusa-haan Belanda (nasionalisasi perusahaan Belanda di zaman Soekarno). Men-jadikan pengalaman ini dikombinasikan dan diperluas di masa Orde Baru dengan bekerja sama dengan para Cukong. Soeharto yang ketika menjadi Pangdam Diponegoro telah memiliki hubungan bisnis dengan Liem Soe Liong makin memperbesar usahanya di era Orde Baru bekerja sama dengan PMA asing lewat undang-undang penanaman modal asing yang dikeluarkan pada tahun 1967. Sejak tahun 1967 banyak perusahaan PMA yang beroperasi di Indonesia. Menandai era liberalisasi ekonomi di Indonesia. Era kebebasan ekonomi ini dikritik oleh mahasiswa pada tahun 1974 yang kita kenal sebagai “Peristiwa Malari” dengan tokohnya Hariman Siregar, Ketua Umum Dewan Mahasiswa UI. Pada waktu itu gelombang demonstrasi mahasiswa menggoyahkan pemerintahan Soeharto. Agaknya, Peristiwa Malari dengan tokoh mahasiswanya Hariman Siregar telah menyadarkan Soeharto bahwa perlu peran negara dan “personal rule” yang lebih besar di dalam pembangunan ekonomi. Soeharto pada waktu itu berhasil menjadikan sekretariat negara menjadi kekuatan politik yang kuat menopang kekuasaannya. Sekneg (Sekeretaris Negara) yang dipimpin oleh Sudarmono mampu menerjemahkan keinginan Soeharto di dalam mengoperasionalkan pembangunan. Instrumen yang dimainkan adalah Kepres 14 dan 14 A untuk mengatur semua tender-tender pembangunan infrastruktur dalam skala besar di bawah kendalinya. Untuk mengimbangi kekuasaan Sekneg yang membesar Soe-harto menggunakan Jenderal TNI

Benny Murdani sebagai pengimbang Sudarmono. Benny yang merupakan kader Ali Murtopo, melanjutkan kelompok Ali Murtopo (CSIS) dan para Cukong yang mendapatkan lisensi dan fasilitas. Para analis mencatat, kelompok Sudarmono dapat diidentifikasi beraliran nasionalis sementara kelompok Benny Moerdani yang didukung oleh para Cukong dan ekonom yang berorientasi pada pasar. Persaingan antara kelompok Benny dan Sudarmono memuncak ketika Soeharto menentukan siapa calon wakil presiden pada tahun-tahun kemudian. Benny Moerdani sebenarnya berharap dapat menjadi Wakil Presiden namun ambisinya ini dianggap berbahaya bagi kekuasaan Soeharto. Karena L.B. Moerdani seorang jenderal yang “powerfull”, menurut akademisi Cornell University, Benedict ROG Anderson, hanya Benny Moerdanilah yang dapat melakukan kudeta militer pada masa pemerintahan Soeharto. Karena ketika Benny menjadi Pangab, ia meletakkan orang-orang secara sistematis dan terstruktur di bawah kendalinya. Semua Pangdam di seluruh Indonesia pada waktu itu adalah orang-orangnya seperti Raja Guk-Guk, Theo Syafei, Jenderal Warau, Sintong Panjaitan dan lain-lain. Kombinasi kekuatan TNI AD, cukong dan teknokrat di bawah pengaruh Benny mengkhawatirkan Soeharto.

Oleh karena itu, secara perlahan Benny disingkirkan dari lingkaran kekuasaan Soeharto dengan cara tidak diberikan jabatan lagi setelah menjadi Pangab. Pada waktu itu konon Benny ditawarkan menjadi Dubes Indonesia di Amerika tetapi hal itu ditolak oleh Benny. Para analis melihat, kelompok Benny pada saat ini peranannya masih terlihat pada saat pemerintahan Megawati. Peran Benny digantikan oleh Theo Syafei, namun Theo Syafei orangnya tidak ingin tampil di permukaan. Dia cukup bekerja dalam tubuh PDI Perjuangan. Pengaruhnya terhadap Mega cukup besar. Hal itu terlihat dalam penempatan posisi gubernur DKI dan Kalimantan serta operasi-operasi di lapangan yang dapat memperkuat jalannya pemerintahan Megawati.

Sementara Sudarmono setelah berhasil menjadikan dirinya sebagai wakil presiden juga melakukan penempatan kader-kadernya seperti Murdiono sebagai Mensekneg, Sukarton sebagai Jaksa Agung, Ginandjar Kartasasmita sebagai menteri andalan Soeharto dan tidak lupa Akbar Tanjung sebagai Menteri Perumahan Rakyat. Sejalan dengan perkembangan waktu, persaingan kedua kelompok ini surut setelah Benny Murdani dan Sudarmono tidak ditampilkan dalam panggung politik oleh Soeharto yang muncul justru Faisal Tanjung yang merupakan figur yang lemah karena ia tidak memiliki kelompok yang kuat. Di bawah Faisal Tanjung ada Jenderal Subagyo sebagai Kasad dan Danjen Kopassus Prabowo, yang keduanya menggunakan Islam sebagai simbol politiknya.

Sementara itu Jenderal Wiranto berada di tengah-tengah antara faksi Benny Murdani (Kristen), faksi Sudarmono (Nasionalis) dan faksi Faisal Tanjung (Islam). Wiranto dalam hal ini memiliki hubungan khusus dengan Soeharto. Ia diidentifikasi berwawasan kebangsaan (Merah Putih) oleh karena itu dapat dipahami ketika sebelum era reformasi dan pada era reformasi Wiranto memposisikan dirinya sebagai penengah dalam konflik pada waktu itu. Tekanan-tekanan terhadap Angkatan Darat untuk melakukan reposisi perannya pada awal reformasi dapat diakomodir Wiranto ke dalam kebijakan pencabutan Dwi Fungsi ABRI. Tekanan itu lebih dominan datang dari eksternal ketimbang faktor internal, namun pada waktu itu Wiranto dapat menangkap momentum reformasi dalam melakukan pembenahan tubuh TNI khususnya AD lewat seminar Lemhannas yang merekomendasikan pencabutan Dwi Fungsi ABRI.

Apabila kita lihat perkembangan TNI pada saat ini dimana mengurangi perannya di lembaga Legislatif dan Eksekutif patut diberikan apresiasi, begitu pula kini kita lihat Angkatan Darat mulai menata bisnisnya ke arah yang lebih transparan dengan menempatkan beberapa jenderal reformis sebagai operator bisnis Angkatan Darat.

Ada titik cerah peran purnawirawan militer akibat kelemahan sipil, dan bisa jadi justru “titik rawan” dalam hubungan sipil militer ke depan yang ter- cermin dari keinginan para politisi sipil untuk menggandeng jenderal-jenderal ke dalam partainya seperti keinginan Amin Rais yang dulu konon ingin meminang Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono menjadi calon wapresnya. Begitu pula aktor-aktor politisi lainnya yang mana merekrut para Jenderal purnawirawan menjadi pengurus partai seperti Yunus Yosfiah menjadi Sekjen PPP, Andi Galib sebagai anggota dewan pakar, Syamsul Jalal dan Khalid Gazali menduduki posisi strategis di Partai Bintang Reformasi, sementara itu Jenderal TNI (purn) Sutrisno dan Jenderal TNI (purn) Edi Sudrajat mendirikan partai PKP, sedangkan Jenderal TNI (purn) A.M. Hendro Priyono mendirikan Banteng Muda Indonesia, sebuah underbouw PDIP, Theo Syafei menjadi salah satu ketua PDIP.³⁵

Sedangkan Jenderal TNI (Purn) Wiranto bersama Letjen TNI (Purn) Prabowo mengikuti konvensi GOLKAR. Hal ini membuktikan di era reformasi, pemerintah sipil manapun, atau bahkan partai-partai politik yang tidak berkuasa sekalipun, akan berupaya mengembangkan sayap-sayap politik dalam militer, dan sayap-sayap militer dalam politik. Dengan demikian, menurut Ikrar Nusa Bhakti, hal ini akan meningkatkan posisi tawar-menawar militer terhadap pemerintahan sipil, khususnya dalam melakukan role sharing dalam menentukan ke mana masa depan bangsa akan dibawa.

Menjadi pertanyaan apakah jenderal-jenderal ini dapat bekerja sama dengan pihak sipil dalam menjalankan agenda reformasi untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan golongannya sendiri. Hal ini memang tidak mudah karena secara budaya politik mereka cenderung mengkombinasikan bisnis dan politik dalam mengoperasikan partai atau kelompoknya.

Rakyat berharap tentunya budaya politik semacam ini tidak berlanjut di era reformasi dan seharusnya sikap tegas dan disiplin dari para perwira ini dapat dikonstruksikan dalam sistem yang baru di era reformasi ini.

Persaingan Internal Militer

Proses kejatuhan Soeharto dimulai dari adanya konflik dalam tubuh militer. Konflik itu muncul karena adanya persaingan yang tidak sehat antara Prabowo sebagai junior dengan Pangab Jenderal TNI Wiranto selaku seniornya, dan jenderal-jenderal lain yang merasa dilangkahi oleh Prabowo. Prabowo banyak disebut sebagai “the rising star” dan memiliki hubungan khusus dengan kalangan Islam ideologis.

Awal konflik, bermula dari munculnya kelahiran generasi baru di dalam tubuh TNI yang tidak lepas dari “pengolahan politik” dan “campur tangan amat dalam” oleh Soeharto ke dalam tubuh ABRI agar jauh dari kelompok sekuler LB Moerdani - Edi Sudradjat dan lingkarannya ke ICMI dengan afiliasi Jenderal Faisal Tanjung - Hartono dan lingkarannya, sementara Wiranto berposisi di tengah yang mempresentasikan “suatu sikap moderat” di antara faksi-faksi militer buatan (protégé) Soeharto. Sebelum menjadi Kasad, Wiranto pernah menjabat sebagai Pangdam Jaya dan Pangkostrad. Naiknya Wiranto diikuti promosi Prabowo sebagai Danjen Kopasus tahun 1994.

Seiring dengan promosi Prabowo sebagai Pangkostrad dengan pangkat Letjen, teman-teman Prabowo juga dipromosikan sebagai Pangdam Jaya yaitu Sjafrie Samsudin, Muhdi PR sebagai Danjen Kopassus dan Kivlan Zein sebagai Kepala Staf Kostrad.

Di mata para analis militer Indonesia, Prabowo nampaknya melanjutkan afiliasi Tanjung-Hartono atau politik akomodasi kelompok Islam. Di sini lagi-lagi Soeharto sengaja menciptakan keseimbangan antara Wiranto dengan Prabowo dalam setiap mutasi dan promosi ABRI. Seperti ketika Wiranto diangkat menjadi Pangab, maka Pak Harto mengangkat Soebagyo sebagai Kasad, dan Soebagyo dikenal sebagai kawan dekat Prabowo. Sementara itu SBY yang relatif dekat dengan Wiranto diangkat sebagai Kassospol dan kemudian Kaster TNI.

Ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997 dan memuncak pada tahun 1998, yang mana Soeharto terpaksa melakukan persetujuan dengan pihak IMF untuk mendapatkan modal yang menuntut Indonesia harus melakukan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan IMF, di antaranya kebijakan yang tidak populis seperti kenaikan BBM dan melakukan likuidasi bank-bank yang bobrok sehingga terjadi PHK secara besar-besaran.

Ketika terjadi tuntutan mundur dari kalangan mahasiswa pada Soeharto, secara gencar Soeharto berusaha membuat keseimbangan politik dengan melakukan rekayasa kerusuhan sosial (mengalihkan perhatian dari tuntutan terhadap Soeharto untuk mundur) namun rekayasa tersebut malah menambah dan memicu kerusuhan dalam skala yang luas pada waktu itu (12-13 Mei 1998 masih merupakan misteri siapa sebenarnya dalang kerusuhan apakah faksi militer liar ataukah faksi Prabowo atau orang-orang LB Moerdani?).³⁷ yang jelas friksi antara Prabowo dengan Wiranto ditambah lagi krisis ekonomi yang mengakibatkan pemerintahan Soeharto kondisinya tidak stabil yang berujung pada mundurnya Soeharto.

Soeharto lengser digantikan oleh Habibie yang konon pada waktu itu Prabowo berharap dapat menggantikan Wiranto, namun Habibie lebih cenderung memilih Wiranto karena alasan senioritas, selain Habibie juga tidak suka dengan Prabowo karena alasan tertentu yang mana pada masa krisis pada bulan Mei 1998 itu Prabowo melakukan pertemuan dengan kelompok Islam garis keras untuk menjatuhkan kekuasaan Soeharto.

Setelah Habibie naik menjadi presiden hubungan sipil militer masih berlanjut seperti masa Soeharto, yaitu Habibie mempercayakan Wiranto sebagai Pangab TNI, dan diberi otonomi untuk melakukan manajemen operasional dalam tubuh militer.

Ketika Habibie turun dan digantikan oleh Gus Dur. Pada masa Gus Dur, kebijakan terhadap TNI berbeda dengan masa Soeharto, dimana Gus Dur melakukan intervensi dalam melakukan pengangkatan pejabat-pejabat militer di lingkungan TNI AD. Di sinilah mulai muncul ketidaksenangan TNI terhadap pemerintahan Gus Dur. Konflik sipil militer pada masa ini menjadi begitu dramatis karena kontrol sipil terhadap militer bersifat subyektif. Akibatnya, banyak jenderal melakukan aliansi taktis dengan Megawati yang menghasilkan konfigurasi ketetapan sebuah pemerintahan yang baru yang dipimpin oleh Megawati yang bemuansa konferatif.

Hubungan yang tidak sehat antara sipil dan militer pada masa pemerintahan Gus Dur terjadi lantaran peranan militer dalam perpolitikan di Indonesia disingkirkan, dan lebih jauh lagi hal itu terjadi karena Gus Dur mengintervensi kepentingan TNI. Ketidakdewasaan para politisi sipil dalam melakukan manuver politik, dan kebijakan Gus Dur yang mencoba meng-

dalikan TNI dengan melontarkan isu pelanggaran HAM yang dilakukan petinggi Angkatan Darat di Timor yang telah melakukan bumi hangus pasca jajak pendapat di provinsi tersebut, telah membuat citra TNI AD makin terpuruk. Namun pada perkembangan selanjutnya, pemerintahan sipil, baik Gus Dur maupun Megawati, tetap gagal menciptakan keamanan dan pemulihan ekonomi.

Posisi politik militer Indonesia belakangan ini dinilai justru kian menguat, meski telah menyatakan tidak lagi melibatkan diri dalam politik praktis. Pandangan ini disampaikan para pengamat militer dalam dan luar negeri. Ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan fenomena itu: warisan sejarah, kelemahan para politikus sipil, keunggulan organisasi dan romantisme masyarakat pada peran politik tentara di masa lalu. Menguatnya posisi politik militer ini pada gilirannya akan mempersulit proses politik menuju demokrasi yang dicoraki oleh supremasi sipil.

John Haseman, bekas atase militer Amerika Serikat di Indonesia 1990-1994 mengatakan, bersamaan dengan jatuhnya Soeharto dan dimulainya era reformasi pada 1998, posisi TNI dalam perpolitikan Indonesia mengalami kemerosotan. Namun, menurut dia, kini postur politik TNI pulih kembali. Tampaknya kini TNI lebih percaya diri dan dihormati

Paralel dengan persepsi Haseman, Eep Syaefulloh Fatah menengarai bahwa meski telah menarik diri dan gelanggang politik praktis, TNI masih berperan aktif di balik layar dalam negosiasi-negosiasi politik dan dalam proses pembentukan kebijakan. Eep melihat tidak ada perubahan yang substansial. Pola pendidikan dan latihan militer Indonesia masih sama, bisnis mereka tidak diutak-atik.

Dalam politik Indonesia di era reformasi tidak lepas dari faktor sejarah. Di bawah rezim Soeharto, militer Indonesia mengalami politisasi hebat. Ini memustahilkan munculnya kekuatan politik sipil yang solid dan terorganisasi. Saat Abdurrahman Wahid menjadi presiden, ia sejatinya telah mencoba untuk melemahkan kekuatan politik tentara, tapi upaya ini gagal karena kesalahan taktis yang dibuat Gus Dur sendiri. Kemudian di bawah Megawati, menurut dia, posisi politik militer kian menguat. Megawati tak memiliki konsep melakukan depolitisasi militer.

William Liddle juga melihat bahwa soal munculnya gejala nostalgia politik dalam masyarakat Indonesia, merujuk hasil beberapa survei, karena masyarakat cenderung menerima kembalinya tentara ke tampuk kekuasaan. Namun, menurut dia, yang menjadi persoalan penting bukan kepentingan TNI untuk kembali ke politik praktis tetapi lebih pada masih adanya kepentingan korporasi TNI. Kepentingan ekonomi TNI, menurut Liddle, masih besar hingga saat ini. Lebih lanjut Liddle mengatakan, ini akan menghambat terwujudnya supremasi sipil atas tentara. Karena, supremasi sipil mensyaratkan anggaran tentara ditentukan politisi sipil.

Meski peran politiknya menguat, toh kecil kemungkinan militer mengambil alih kekuasaan lewat kudeta kemudian membentuk junta militer. Yang mungkin terjadi, jika Indonesia dilanda kekacauan sosial politik besar, adalah dibentuknya kekuasaan proxy, dimana tentara dan sipil bekerja sama menjalankan kekuasaan.

Segitiga Kekuasaan Era Reformasi: Daun Kering Pun Ada Gunanya Sebenarnya, di era reformasi ini, TNI sebagai bhayangkari negara, pengaman bangsa dan ideologi negara haruslah mengikuti keinginan rakyat untuk melakukan reformasi politik dan ekonomi secara mendasar, apalagi tuntutan reformasi, yaitu memberantas korupsi dan melakukan

pembenahan birokrasi serta mensejahterakan rakyat tidak akan bisa terwujud tanpa pembenahan hukum. Misalnya, dalam perbaikan isi KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) harus mencantumkan hukuman mati bagi para koruptor yang melakukan korupsi Rp 1 milyar ke atas. Tindakan yang tegas ini harus diperjuangkan oleh semua komponen bangsa khususnya TNI AD yang memiliki kekuatan politik di era Orde Baru dan era reformasi. Di era reformasi kita lihat kepemimpinan Mega didukung oleh Angkatan Darat yang diwakili oleh fraksi kelompok Benny Moerdani lewat operator politiknya yang ditempatkannya di PDIP yakni Theo Syafei. Sialnya, Theo Syafei tercemar rumor KKN dalam kasus pemilihan Gubernur Kaltim, padahal ia bisa saja menyarankan kepada Mega untuk melakukan pembenahan-pembenahan di bidang hukum dan birokrasi.

Sementara itu ada kekhawatiran dari sebagian pihak. Kehadiran TNI akan melakukan penerapan gaya manajemen masa Orde Baru, dan hal ini akan menjebak reformasi ke dalam lumpur sehingga reformasi terus berkubang dalam lobang yang dalam.

Padahal, apabila para Jenderal-jenderal purnawirawan yang ada di dalam partai politik dapat melakukan pembenahan, justeru akan memberikan dampak positif bagi kemajuan demokrasi.

Ini memang bukan suatu hal yang mudah karena budaya politik militer yang cenderung melakukan bisnis dalam politik dan otoriter serta “serba koman- do”. Namun bila dilihat dari upaya-upaya orang-orang seperti Hari Sabamo yang telah melakukan pembenahan birokrasi lewat Departemen Dalam Negeri patut diapresiasi meski masih banyak juga kekurangannya.

Sementara itu Wiranto misalnya, juga mulai sadar untuk melakukan demokratisasi dengan menggerakkan rekan-rekannya dari LSM dan kalangan ilmuwan yang moderat, untuk ikut dalam proses demokratisasi lewat konvensional Golkar.

Mengambil pepatah orang Indonesia bahwa “Daun kering pun ada gunanya,” begitu pula para jenderal purnawirawan ini, bisa saja kalangan civil society mengarahkan para purnawirawan militer ini berperan positif dalam reformasi kalau sungguh-sungguh ingin memperbaiki kondisi bangsa. Walaupun mereka ketika aktif di masa Orde Baru banyak dicela dan dihujat karena KKN dan kejahatan kemanusiaan/HAM. Kini mereka telah masuk dalam era reformasi dan pengalaman operasional dan kepemimpinannya dalam militer masih dapat dimanfaatkan dalam melakukan pembenahan birokrasi dan hukum dewasa ini asalkan berani melakukan terobosan-terobosan politik dan inovasi politik dalam kerangka membenahi hukum dan keamanan secara sistematis. Mereka harus berani menghukum bagi para koruptor yang menyusahkan rakyat, meski mereka menyandang beban masa lampau yang berat.

Apabila kita lihat pada awal Orde Baru, dimana angkatan darat melakukan inovasi politik dengan mendirikan organisasi KINO Golkar (Kelompok Induk Organisasi) yang merupakan upaya untuk menyaingi PKI yang pada waktu itu beradsa di tengah-tengah kekuasaan Soekarno yang dominan. ABRI pada waktu itu melakukan upaya agar tidak dipecundangi oleh PKI dan dengan strategi ini ABRI mampu mengalahkan PKI sebagai rival politiknya sekaligus mengeliminir kekuasaan Soekarno secara sistematis sehingga turun dari panggung politik. Memang disadari pada waktu itu bibit konflik antara PKI dan ABRI tidak lepas dan peran Soekarno untuk mem-posisikan ABRI sebagai tangan kanannya untuk mempersatukan Indonesia dan tangan kirinya Soekarno yaitu PKI untuk menggalang masa baik di perkotaan atau di pedesaan. Kedua kekuatan ini, baik PKI maupun ABRI, digunakan Soekarno untuk menyanggah kekuasaannya sehingga terben-tuklah segitiga kekuasaan pada waktu itu. Soekarno berada di pucuk pimpinan sementara di sisi kirinya PKI dan di sisi

kanannya ABRI. Pola semacam ini sebenarnya dilanjutkan Soeharto dengan tangan kirinya birokrasi dan teknokrat sedangkan tangan kanannya ABRI, khususnya angkatan darat, di antaranya terdapat faksi Benny Murdani yang secara sistematis mengendalikannya kebijakan Megawati.

Keraguan banyak pihak akan kemampuan Megawati dalam mengelola kekuasaan dan pemerintahan dari hari ke hari terbukti dengan tidak adanya kebijakan yang berarti, baik untuk recovery ekonomi, maupun penyelesaian konflik.

Bahkan kalangan pengamat asing yang memantau dan mengamati sepak terjang Mega ketika itu seperti kehilangan semangat untuk mendiskusikan Indonesia di bawah kepemimpinan Megawati, karena sejak tahun 1990-an mereka sudah berkesimpulan bahwa Mega sesungguhnya bukanlah tokoh politik yang punya kapasitas dan kapabilitas. Kalaupun ia kemudian terjun ke politik dan memimpin Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P), itu semata-mata karena ia berlandung di balik nama besar dan kharisma bapaknya dan bersandar pada militer untuk menjaga kekuasaannya.

Ironisnya lagi adalah banyak pihak melihat bahwa ternyata di tengah bera-gam keraguan itu, ada kekuatan dan jaringan lama yang mengendalikan Megawati, yang membuktikan masih kuatnya sayap militer dalam PDI-P pimpinan Megawati.

Dari sumber lembaga analisa politik yang berkedudukan di dalam negeri maupun di Amerika diperoleh bocoran bahwa ternyata di lingkaran kekuasaan Megawati banyak diisi oleh orang-orangnya L.B. Moerdani (Benny). Fenomena itu menguatkan dugaan beberapa pihak bahwa Mega berada di bawah kendali jaringan LB Moerdani. Sejauh mana fakta ini mengandung kebenaran, masih harus kita periksa, namun rumor itu telah menyebar di kalangan Islam dan nasionalis moderat.

Apa yang tergambar dari dokumen itu adalah betapa yang menguasai, mensuplai gagasan dan strategi serta taktik, dan bahkan cenderung meng-atur/mendikte Megawati dalam mengelola kekuasaannya, menghadapi lawan-lawan politik adalah mereka-mereka yang tergolong kademya Benny Moerdani dan loyalis Mega.

Untuk mengendalikan kekuasaan, Benny menempatkan orang-orangnya di semua lini, baik di kabinet, intelejen, pengusaha, birokrasi dan juga parpol. Termasuk jaringan pemuda dan preman.

Dalam analisa para pengamat militer, tujuan utama yang hendak dicapai orang-orang Benny yang dipasang untuk mengelilingi Megawati tersebut adalah untuk memantapkan dan mempertahankan kekuasaan, dengan misi-misi strategis dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan logistik (dana politik) untuk operasi-operasi intelejen dan politik dan persiapan untuk kemenangan pemilu 2004, baik melalui jalur formal lembaga-lembaga negara (BUMN, BPPN), maupun dari sektor pasar gelap (Black Market of Political Power), dan dunia perjudian.

2. Memperlemah kekuatan sipil yang potensial dengan memecah belah kekuatan partai politik besar yang dianggap solid dan bakal menjadi kompetitor PDI-P dalam pemilu 2004, seperti: PPP, Golkar, PKB, PBB.

3. Mengkotakkan orang-orang yang dianggap tidak loyal dengan Megawati di PDI-P, dan memapankan posisi golongan pembela Mega. Melancarkan perang urat syaraf melalui operasi-operasi intelejen, dengan mempertentangkan ideologi Nasionalisme Sekuler dengan Agama, memanfaatkan momentum, dimana Amerika sedang menciptakan musuh baru (terorisme) pasca tragedi 11 September 2001. Ia juga ikut menentukan kebijakan-kebijakan

strategis yang diambil Megawati, termasuk dalam penempatan personil pada jabatan-jabatan strategis baik sipil maupun militer, tarik ulur kasus pergantian Panglima TNI. Salah satu contoh adanya pengaruh dan peran Hendropriyono, perwira purna- wirawan TNI yang berusaha menjaga hubungan dengan kalangan nasionalis dan Islam. Rezim Mega juga menggalang kekuatan ormas pemuda yang punya basis masa yang besar (Pemuda Muhammadiyah dan GP Anshor).

4. Memantapkan pengamanan Megawati sekaligus memfilter akses orang ke Megawati dengan menguasai Pasukan Pengawal Presiden. Memantapkan posisi dan resentralisasi power pengendalian birokrasi di Setneg.

Pada pemilu tahun 2004 tetap tidak muncul kekuatan baru yang mampu melakukan reformasi politik yang cukup berarti. Dalam hal ini, purna- wirawan militer dan sipil yang bertarung sebagai calon presiden dari parpol- parpol ternyata masih belum mampu melakukan reformasi. Mengambil istilah pemimpin Cina Deng Xiaoping yang kira- kira artinya “Tidak peduli kucing itu hitam atau putih yang penting mampu menangkap tikus”. Begitu pula di Indonesia, kita tidak memandang partai politik mana yang menang atau memegang kekuasaan yang penting dapat menjalankan agenda reformasi. Karena kita sadar kekuatan reformasi seperti partai-partai baru sulit memenangkan pemilu sehingga tidak dapat diandalkan untuk melakukan terobosan politik. Apabila kita lihat kelemahan Golkar pada era Soeharto yang menjalankan birokrasi dagang untuk mengoperasionalkan jalannya negara yang banyak menimbulkan distorsi, maka pada masa Soekarno pun kita lihat adanya distorsi dengan terlalu berkuatnya Soekarno pada janji- janji politik dan slogan-slogan politik sehingga lupa mensejahterakan rakyatnya. Begitu pula pada zaman kolonial Belanda, birokrasi dagang hanya menguntungkan kaum kapitalis dan imperialis. Bertitik tolak pada kesadaran atas masa lalu yang penuh dengan kekurangan-kekurangan, maka masa kini kita harus belajar banyak dari masa lalu yang sangat mem-pengaruhi jalannya politik dewasa ini. Hal tersebut diperlukan agar output dari sistem politik yang kita kembangkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih baik, dan mampu memiliki daya saing di tingkat internasional.

Di Indonesia kelas menengah dilahirkan oleh negara seperti konglomerat yang sangat tergantung oleh fasilitas negara, begitu pula kaum birokrat yang sangat suka berdagang di dalam birokrasi pemerintahan sehingga tidak bisa diharapkan sebuah kelas menengah yang mandiri. Apalagi di kalangan TNI/ABRI sebagai kekuatan politik sangat dipengaruhi oleh gaya dan cara- cara Soeharto dalam menjalankan sistem kenegaraan, seperti kita ketahui Soeharto lahir dari masyarakat Jawa yang feodal, yang ketika muda pernah masuk menjadi anggota KNIL yang secara tidak sadar mempraktekkan cara- cara imperialis di dalam kekuasaannya. Begitu pula ketika pada masa pemerintahan Jepang, Soeharto aktif dalam Heiho, sebuah laskar bentukan Jepang. Pada pemerintahan Soekarno, Soeharto dekat dengan kalangan kelompok Murba dengan tokohnya Adam Malik oleh karena itu tidaklah heran apabila Soeharto melakukan kontak- kontak dengan Untung dan kawan-kawan yang melahirkan terobosan politik dalam mengeliminir kekuasaan Soekarno. Terobosan politik ini dilanjutkan dengan melakukan inovasi politik dengan menggabungkan pemodal asing (PMA) dengan mengeluarkan undang- undang PMA pada tahun 1967 yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan Jepang melakukan perluasan usaha di Indonesia. Soeharto pada waktu itu bekerjasama dengan

mafia melakukan inovasi ekonomi dengan melakukan pembangunan ekonomi yang secara internasional diakui sebagai keajaiban ekonomi di tahun 90-an, meskipun ini tidak berlangsung lama. Tahun 1997 keajaiban ekonomi ini berbalik menjadi kehancuran ekonomi. Kehancuran ini dikarenakan pondasi ekonomi dilandaskan pada sistem birokrasi dagang (KKN). Untuk itulah kekuatan TNI pada era reformasi jangan digunakan melakukan kesalahan lagi seperti pada masa Soeharto. Jenderal-jenderal purnawirawan yang ingin aktif dalam partai politik di era reformasi harus punya itikad baik untuk melakukan inovasi politik ke arah yang benar, yaitu berpihak pada rakyat kecil dan tetap melakukan pembenahan birokrasi dan mendorong ke arah pertumbuhan ekonomi yang benar agar mekanisme pasar yang telah dirintis oleh ekonom dari UI dan IMF tidak menjadi bumerang pada masa yang akan datang.

Di samping itu penciptaan sistem politik yang bersih dan efisien serta steril dari pemikiran “bisnis keamanan,” yang cenderung mewamai keadaan pada pasca Soeharto. Rekayasa konflik-konflik di daerah-daerah yang terjadi pada masa lalu, cenderung membuang-buang waktu dan tenaga serta hasilnya pun tidak ada justru malah menyusahkan rakyat hingga kini. Rekayasa politik semacam itu jangan sampai diulangi lagi karena kini saatnya justru melakukan rekayasa politik ke arah kebaikan.

Kestabilan politik nasional adalah indikator membaiknya kehidupan politik di negeri ini. Jika memang ada pertarungan antar partai, itu bukan lagi bersifat ideologis, tetapi pertarungan yang lebih bersifat masalah program. Dan nampaknya persaingan antar partai adalah gejala yang harus ada sebagai tanda dinamika dalam kehidupan politik nasional.

Semakin gencarnya isu keterbukaan dan demokratisasi yang dilontarkan oleh masyarakat madani di Indonesia akhir-akhir ini, makin sulitlah peran dan posisi militer yang masih belum sepenuhnya lepas dari paradigma lama yang Orbarian. Hal ini adalah positif bagi perkembangan demokrasi politik di Indonesia, walaupun masih dalam tahap verbalistik. Tindak lanjut dari pernyataan itu perlu direalisasikan dalam kehidupan kenegaraan sehingga ungkapan-ungkapan keterbukaan tidak hanya sebatas jargon politik yang artifisial sementara esensinya tidak ada dalam kehidupan nyata. Pengurangan atau rasionalisasi pangangkatan anggota TNI ke dalam lembaga legislatif adalah salah satu upaya realisasi dari itu yang harus dilakukan.

Mempertahankan mekanisme politik seperti era Orba Soeharto, khususnya mengenai pangangkatan anggota ABRI yang relatif besar dalam legislatif, dapat menimbulkan involusi politik.

Secara institusional atau struktural kehidupan politik berjalan sesuai dengan mekanisme demokrasi, artinya secara formal memang ada instrumen-instrumen politik yang bercorak sistem pemerintahan demokrasi. Tetapi apakah instrumen itu dapat menjalankan fungsinya merefleksikan kehidupan demokrasi? Ataukah justru yang terjadi dalam realita adalah merusak sendi-sendi demokrasi itu sendiri? Hal ini masih patut dipertanyakan.

Pada masa Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal (1949-1957), militer Indonesia benar-benar di bawah pemerintahan sipil. Di masa inilah terjadi rasionalisasi tentara dan pembentukan ABRI yang profesional dan terintegrasi. Namun demikian, pada masa ini mulai terbentuk sayap-sayap militer dalam partai-partai politik dan “sayap-sayap partai-partai politik dalam organisasi kemiliteran”. Adanya campur tangan pemerintahan sipil dalam masalah-masalah internal militer menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan perwira tinggi dan menengah militer. Ini menyebabkan

terjadinya “setengah kudeta” (half coup) pada 17 Oktober 1952 yang melibatkan beberapa perwira militer profesional didikan Belanda, seperti Kemal Idris, yang mengarahkan moncong meriam ke Istana Merdeka.

Keterlibatan militer dalam bidang politik dan ekonomi mendapat angin segar pada masa transisi dari Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin (1957- 1959). Paling tidak, ada tiga peristiwa penting yang menyebabkan tertancapnya kuku-kuku militer di bidang politik, ekonomi dan sosial. Pertama, nasionalisasi perkebunan-perkebunan dan perusahaan-perusahaan Belanda, dimana militer berupaya mengambil alih sebanyak mungkin aset perusahaan-perusahaan tersebut agar tidak diambil oleh saingan utamanya, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Kedua, munculnya pemberontakan-pemberontakan daerah yang menyebabkan pemerintah mengemukakan negara dalam keadaan darurat perang (staat van oorlog en beleg/ SOB). Ketiga, belum selesainya Konstituante dalam membuat Undang-Undang Dasar baru pengganti UUD 45 dan adanya pertarungan dalam menetapkan ideologi negara, Pancasila atau Islam.⁴¹

Ini menyebabkan Presiden Soekarno, atas desakan militer, menetapkan Dekrit 5 Juli 1959 yang disusul dengan pembentukan Dewan Nasional dan kabinet yang terdiri atas berbagai unsur kekuatan sosial-politik, termasuk militer.

Pada masa inilah, tepatnya 11 November 1958, A.H. Nasution, pada acara wisuda lulusan Akademi Militer Magelang, mencetuskan konsep “Jalan Tengah” (The Middle-Way), yang intinya, ABRI bukan sekadar alat sipil seperti di negara-negara Barat, juga bukan sebuah rezim militer yang mendominasi kekuasaan negara, melainkan merupakan salah satu dari banyak kekuatan dalam masyarakat, kekuatan demi perjuangan rakyat yang bekerja bahu-membahu dengan kekuatan-kekuatan lain yang dimiliki rakyat. Konsep “Jalan Tengah” inilah yang menjadi cikal bakal dari “Dwifungsi ABRI”. Konsep “Jalan Tengah Tentara” (The Army's middle way) ini kemudian dijabarkan oleh Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI-AD (Seskoad), Brigjen Soewarto, dan menjadi alat legitimasi militer untuk berperan dalam masyarakat, di luar peran Hankam, khususnya dalam menghadapi PKI.

Era 1960-AN merupakan era ketegangan dalam hubungan TNI-PKI-Soekarno yang bisa dianggap sebagai segitiga kekuasaan yang saling bersitegang. Dalam periode 1962-1965, dimana terjadi hubungan segitiga Soekarno- Tentara (TNI-AD)-PKI, terdapat persaingan yang amat tajam antara TNI-AD dan PKI dalam merebut hati Presiden Soekarno. Pada masa ini, muncullah doktrin Tri Ubaya Cakti (Three Sacred Vows) yang merupakan hasil Seminar Angkatan Darat I, 2-9 April 1965, yang masih berbau Soekarnois. Pada intinya doktrin yang menyatakan bahwa kedudukan TNI-AD sebagai golongan karya ABRI merupakan suatu kekuatan sosial politik dan kekuatan militer; adalah bagian daripada kekuatan progresif revolusioner yang menetapkan sekaligus perannya sebagai alat revolusi, alat demokrasi serta sebagai alat kekuasaan negara, ikut mengambil bagian dalam menentukan dan melaksanakan haluan negara.

Doktrin tersebut kemudian disempurnakan/dikoreksi total dalam Seminar AD II di Bandung, 25-31 Agustus 1966, dengan membuang jauh-jauh hal-hal yang berbau Soekarnois atau Orde Lama, sejalan dengan menurunnya kekuasaan Soekarno. Melalui doktrin inilah untuk pertama kalinya dirumuskan konsep Dwifungsi ABRI, yang menegaskan bahwa angkatan bersenjata memiliki dua fungsi, yaitu sebagai kekuatan militer dan kekuatan

sosial-politik. Sebagai kekuatan sosial politik, aktivitas tentara meliputi bidang-bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan.

Setelah gagalnya kudeta yang dilakukan sayap komunis tentara pada 30 September 1965, kekuatan Soekarno dan PKI pun memudar dan kemudian hilang. Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjadi Pangkostrad secara cepat menggilas PKI dan secara lambat tetapi pasti, menggilas kekuatan Soekarno. Tinggallah TNI-AD sebagai kekuatan utama (the first among equals) dalam sistem politik Indonesia. Pada masa transisi politik dari Soekarno ke Soeharto, 1966-1967, terjadilah rekayasa sejarah untuk membenarkan peran sosial politik ABRI. Secara internal dan eksternal, doktrin militer Orde Baru menekankan tema-tema familiar, antara lain, ABRI ber-asal dari rakyat, lahir dan berjuang bersama-sama rakyat pada masa Revo-lusi

Kemerdekaan. ABRI sangat setia pada ideologi Pancasila dan akan tetap mempertahankan UUD 45. Di masa inilah lahir Doktrin Catur Dharma Eka Karma (Four Missions, One Fate), yang menekankan bahwa jajaran ABRI (Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian) disatukan dalam satu doktrin ABRI.⁴²

Singkatnya, untuk meningkatkan bobot dan legitimasi Dwifungsi, maka pada 1982 dikeluarkanlah UU NO.20/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, dimana pada Pasal 26 dan 28 UU tersebut dengan jelas mengatur fungsi dari non-hankam ABRI. Selanjutnya dikeluarkan UU NO.2/1988 tentang Prajurit ABRI, dimana pada Pasal 6 ditentukan bahwa prajurit ABRI mengemban tugas Dwifungsi, yaitu sebagai kekuatan hankam dan kekuatan sospol.

Peran non-hankam militer semakin menggurita pada masa Orde Baru (1966- 1998). Atas nama stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, ABRI membungkam hak-hak rakyat untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat, melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia, dan mencegah partisipasi politik rakyat yang tidak sesuai dengan kepentingan rezim. Melalui model penelitian khusus (litsus), ABRI mencegah masuknya unsur-unsur yang berhaluan kiri atau kanan untuk masuk ke jajaran birokrasi sipil dan militer. Bahkan ke lembaga-lembaga swasta yang dianggap strategis, ABRI juga memberikan interpretasi tunggal atas ideologi negara, Pancasila. Selain itu, ABRI juga membangun institusi-institusi teritorial yang merupakan pemerintahan bayangan bagi institusi jaringan pemerintahan dalam negeri, dari tingkat Kodam (Propinsi), Korem (Kabupaten), Kodim (Kecamatan), Kora-mil (Kelurahan) sampai ke Babinsa/Bintara Pembina Desa (desa). Melalui "Politik Ketakutan" (The Politics of Fear) dan represi politik, ABRI berupaya untuk menciptakan stabilitas politik melalui penetrasi dari atas. Pada masa ini pula ABRI mendudukkan orang-orangnya di jabatan-jabatan birokrasi pemerintahan, dari menteri, sekretaris jenderal departemen pemerintahan, gubernur, bupati, diplomat, sampai ke kepala-kepala desa, yudikatif dan legislatif. Meskipun ABRI,⁴³ khususnya TNI-AD, sejak pertengahan 1980-AN bukanlah penguasa tunggal melainkan lebih sebagai salah satu alat kekuasaan Presiden Soeharto, jaring-jaring kekuasaan yang menggurita tersebut telah menyebabkan timbulnya kekuasaan militer yang berlebihan (military over-reach).

Begitu patronnya jatuh, sejalan dengan jatuhnya Presiden Soeharto, jatuh pula pamor dan kekuasaan ABRI. Kini ABRI yang sejak 1 April 1999 mengubah namanya kembali menjadi TNI, masih dalam keadaan yang gelisah karena terus-menerus dikritik dan masih penuh ketidakpastian mengenai perannya dalam kehidupan bernegara

Reformasi TNI Era Wiranto

Menghadapi kritik dan hujatan akibat Dwi Fungsi ABRI era Orba Soeharto itu, maka di era Presiden BJ Habibie, Pangab/Menhan Wiranto dan Kassospol TNI SB Yudhoyono mengambil peran menentukan dalam reformasi militer. Menurut Jenderal Wiranto, yang saat itu menjadi Menhan/ Panglima TNI, ada tiga perkembangan ekstrem yang harus dicegah, yaitu: Pertama, *military over-reach*, yaitu militer menguasai berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti pada masa Orde Baru; Kedua, *subjective civilian control*, yaitu kontrol subyektif pemerintahan sipil terhadap militer seperti yang terjadi pada masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin; Ketiga, pemisahan rakyat dari ABRI.

Sejalan dengan itu, Jenderal Wiranto mengemukakan 14 langkah mendasar reformasi internal ABRI, yaitu (1) sikap dan pandangan politik ABRI tentang paradigma baru peran ABRI di abad ke-21; (2) sikap dan pandangan politik ABRI tentang paradigma baru peran sospol ABRI; (3) pemisahan Polri dari tubuh ABRI sejak 1 April 1999; (4) penghapusan Dewan Sospol Pusat dan Daerah; (5) perubahan staf sospol menjadi staf teritorial; (6) likuidasi Staf Karyawan (Stawan) ABRI, Kamtibmas ABRI, dan Babinkar ABRI; (7) penghapusan sospoldam, babinkardam, sopolrem dan sopoldim; (8) penghapusan kekayaan ABRI melalui pensiun atau alih status; (9) pengurangan jumlah Fraksi ABRI/Polri di DPR dan DPRD I/II; (10) ABRI tidak akan lagi terlibat dalam politik praktis; (11) pemutusan hubungan organisatoris dengan Partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan semua partai politik yang ada; (12) komitmen dan konsistensi netralitas ABRI dalam pemilu; (13) perubahan hubungan ABRI dan Keluarga Besar ABRI, dan; (14) revisi piranti lunak berbagai doktrin ABRI disesuaikan dengan era reformasi dan peran ABRI di abad KE-21.

Hampir semua 14 langkah reformasi internal tersebut sudah dilakukan oleh TNI. Kini TNI masih menggodok revisi piranti lunak berbagai doktrin ABRI dan mencoba meletakkan kembali peran sopol-nya sesuai dengan era reformasi. Selain itu, sifat represif dan memata-matai masyarakat juga sudah dilenyapkan oleh pemerintahan Gus Dur dengan dihapuskan dari lembaga-lembaga seperti Dewan Pemulihan Keamanan dan Sistem Hukum (DPKSH), Bakorstanas dan Bakorstanasda, serta lembaga Litsus.

Dalam hal ini, Pangab Endriartono Sutarto sebagai penerus Wiranto, nampak menegaskan komitmen TNI untuk tidak berpolitik praktis dan memanfaatkan reformasi militer. Sebagaimana garis-garis pedoman reformasi militer era Wiranto, Sutarto menyatakan bahwa pergantian pemerintahan dan format politik tahun 1998 telah mengubah format penampilan TNI untuk dapat mengabdikan diri bagi bangsa dan negara secara optimal sebagaimana dimaksud para founding fathers.

Dalam era reformasi ini, TNI telah dan sedang melakukan reorientasi pos-tur, tugas, fungsi, dan perannya dalam kehidupan bangsa dan negara. Reformasi kehidupan kenegaraan 1998 menjadi titik balik sejarah TNI. Meski banyak pihak mulai mencemaskan perjalanan dan masa depan proses reformasi, yang dinilai makin tidak jelas arahnya, masyarakat mendapat keterbukaan dan kebebasan luar biasa. Pers bebas mengemukakan kritik kepada pemerintah, kekuasaan yang semula terpusat di wilayah eksekutif kini menyebar ke legislatif; dan aspirasi untuk menyuburkan kehidupan yang lebih demokratis mendapat tempat amat terbuka. Singkatnya, negara dan pemerintah yang dulu serba sentralistik kini menjadi negara dengan pemerintah yang memiliki kekuasaan yang terfragmentasi. Dalam situasi seperti ini, sulit bagi kekuatan politik dan

kelompok mana pun mendominasi kehidupan bernegara. Semua pihak harus melakukan penyesuaian, termasuk TNI. Disadari atau tidak, tuntutan bagi lahirnya kehidupan bernegara yang lebih demokratis mengubah hubungan sipil-militer. Peran dominan tentara seperti di masa lalu tidak mungkin berlanjut lagi.⁴⁵

Posisi dominan seperti itu memberi banyak privilege keadaan yang boleh disebut sebagai suatu jebakan yang nyaman (*comfort zone trap*). Kondisi demikian menyebabkan terjadinya pergeseran cara pandang prajurit TNI yang semula berorientasi pada aspek pertahanan-keamanan menjadi berorientasi pada politik praktis, jabatan-jabatan politik, bahkan kepentingan bisnis yang tidak selamanya konsisten dengan misi utama tentara sebagai penjaga kedaulatan negara. Menengok ke belakang, sebenarnya dominasi peran tentara di masa lalu, semata-mata bukan kehendak TNI. Hal ini didorong perubahan tatanan politik yang lalu melahirkan Orde Baru. Pada awal 1960-an, hampir semua pihak mendekat dan mendukung TNI, terutama bagi mereka yang merasa tidak

Dalam hal ini, salah satu tonggak penting perubahan posisi dan peran TNI adalah Tap MPR No VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tap MPR ini merupakan dokumen penting yang menjadi dasar penataan selanjutnya. Dalam Tap itu disebutkan, TNI adalah alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45, serta melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman serta gangguan atas keutuhan bangsa dan negara. TNI juga melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang, serta TNI berke-wajiban memberikan bantuan berupa penyelenggaraan tugas kemanusiaan (*civic mission*). Memberi bantuan kepada Kepolisian Negara RI dalam tugas keamanan atas permintaan yang diatur undang-undang, serta aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian dunia (*peace keeping operation*) di bawah PBB.

Salah satu isu pokok reposisi peran TNI adalah keterlibatannya dalam proses penyelenggaraan negara. Dalam Tap MPR yang sama, peran TNI dirumuskan bahwa kebijakan politik negara merupakan dasar kebijakan dan pelaksanaan tugas TNI; TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis; TNI mendukung tegaknya demokrasi, menjunjung tinggi hukum, dan HAM; anggota TNI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaannya dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui MPR paling lama hingga tahun 2009 dan anggota TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan.

Kelanjutannya, disusun pedoman normatif yang lebih operasional tentang proses reformasi dan penataan kembali institusi dan peran TNI dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, yang merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan nasional di tiap sektor. Pokok-pokok kebijakan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan dalam Propenas itu meliputi: menata kembali TNI sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran TNI sebagai alat negara; mengembangkan sistem pertahanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama didukung komponen lain dengan meningkatkan kesadaran bela Negara nyaman dengan makin

kuatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI). Rakyat yang takut pada kedigdayaan PKI dan tidak dapat menerima pemerintahan komunis bersama-sama menyusun barisan di belakang TNI; termasuk kelompok mahasiswa, intelektual, organisasi pemuda, buruh, tani, nelayan, hingga partai-partai politik. Melalui wajib latih dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan TNI, Polri, dan rakyat.

Endriartono Sutarto tampaknya meneruskan reformasi militer era Wiranto dengan fokus meningkatkan profesionalitas TNI, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama, dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan kewilayahan yang didukung sarana, prasarana, dan anggaran memadai; serta memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan turut berpartisipasi dalam pemeliharaan perdamaian dunia. Dua dokumen itu dijabarkan dalam program kerja dan langkah-langkah, seperti berikut.⁴⁶

Pertama, melanjutkan agenda reformasi internal TNI utamanya perubahan kultur prajurit, melalui konsistensi sikap untuk benar-benar menjadikan diri sebagai alat negara di bidang pertahanan dengan tidak memasuki wilayah politik praktis dan partisan.

Kedua, melanjutkan proses menjadikan prajurit TNI profesional dan disiplin yang menjunjung tinggi hukum dan HAM guna meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi utama melalui penyempurnaan kurikulum di semua tingkatan pendidikan dan juga penyempurnaan materi latihan.

Ketiga, memelihara kehidupan prajurit yang sehat dengan menghargai prestasi dan profesional serta pemberian sanksi secara proporsional bagi mereka yang melanggar hukum dan indisipliner (reward and punishment) yang harus konsisten diterapkan melalui jalur hukum. Bagi prajurit indisipliner, baik itu yang dilakukan di medan tugas maupun di home base diproses melalui pengadilan militer atau pengadilan koneksitas serta penjatuhan sanksi administratif berupa pemecatan atau pencopotan dari jabatan.

Keempat, berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap masalah bangsa seperti kasus gerakan separatistis, konflik horizontal, terorisme secara proporsional sesuai peran dan tugas TNI. Kita bersyukur, kondisi konflik horizontal di Kalimantan Barat, Poso, dan Maluku dapat diatasi, sementara gangguan keamanan oleh GAM di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga telah berhasil diredam.

Kelima, proaktif menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan (civic mission) dalam membantu meringankan kesulitan masyarakat, diminta atau tidak. Keenam, siap mengemban tugas dalam pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera PBB (peace keeping operation).

Langkah-langkah itu harus dilakukan terus meski kondisi TNI dan bangsa dalam keadaan yang penuh keterbatasan. Memang, rendahnya kemampuan keuangan negara tidak memungkinkan alokasi anggaran memadai bagi kesejahteraan prajurit, demikian halnya untuk memodernisasi alat dan persenjataan.

Inilah ujian bagi TNI, dimana anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan pun masih jauh dari mencukupi. Cercaan dan hujatan yang terus-menerus kepada TNI juga kerap kali menyebabkan sebagian prajurit mengalami demoralisasi dan demotivasi. Di sisi lain, tuntutan masyarakat akan peran TNI dan penyelesaian berbagai masalah konflik horizontal, separatisme dan terjaminnya kedaulatan serta kehormatan bangsa, menuntut kesiapan tempur dan mobilitas tinggi dari prajurit. Sebagai prajurit pejuang, TNI tak boleh

menyerah dengan keadaan. Meski bagaimanapun faktor-faktor itu menimbulkan dilema yang sulit dipecahkan.

Harus disadari oleh semua pihak (kalangan sipil dan militer) bahwa usaha mengembalikan jati diri TNI tidak mudah dilaksanakan, terlebih di tengah tarik-menarik kehidupan politik yang belum sepenuhnya stabil. Hambatan internal dari tubuh TNI yang berpadu dengan aneka tantangan eksternal merupakan isu yang harus ditangani dengan hati-hati.⁴⁷

Meskipun sudah banyak perubahan yang dilakukan ABRI/TNI, masih tampak bahwa konservatisme masih amat melekat di dalam hati sanubari perwira TNI. Harus diakui bahwa jiwa praetorian masih melekat pada jati diri TNI. Misalnya pandangan bahwa militer adalah institusi nasional yang paling peduli pada integrasi bangsa (vertikal maupun horisontal); militer adalah bhayangkari negara yang harus menjaga kesatuan negara, ideologi negara dan konstitusi negara. Hal yang masih buruk, seperti diungkapkan oleh pengamat militer Kusnanto Anggoro,⁴⁸ ialah adanya kecenderungan perwira militer untuk berpihak pada mereka yang memiliki kekuasaan, atau bahkan mendefinisikannya dengan pemerintah.

Selain itu, secara kasat mata tampak jelas bahwa TNI masih memiliki kendala untuk meningkatkan citranya di mata masyarakat, khususnya dalam penegakan hukum atas para pelanggar HAM dari unsur perwira tinggi TNI, baik dalam kasus Timor Timur, Papua, Aceh, Tanjungpriok, Semanggi 1 dan II, Trisakti, Kasus 27 Juli 1996, dan sebagainya. Belum lagi persoalan bisnis, baik legal ataupun ilegal yang dilakukan militer secara institusional maupun oleh individu militer, yang tidak terkait dengan misi TNI untuk menyejahterakan prajuritnya atau menambah anggaran operasionalnya, melainkan lebih banyak untuk kepentingan individu sebagian kecil perwira tinggi.⁴⁹ Dalam era reformasi ini, maka TNI sangat membutuhkan pengaturan konstitusional (UUD) dan peraturan perundang-undangan (Rule of Conduct dan Rule of Engagement) pengganti UU No. 20/1982 untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara, membantu Polri dalam menjaga keamanan negara, melaksanakan civic missions, ikut serta dalam ketertiban dunia serta diplomasi internasional lainnya. Sebagai contoh, kapan TNI harus membantu Polri, berapa kekuatan yang dibutuhkan, dan bantuan tersebut harus bersifat sementara dan bukan permanen (jika keamanan telah dicapai, maka tugas tersebut selesai). Dalam konteks demokratisasi,⁵⁰ secara ideal-normatif kita sedang dan harus bergerak semakin dekat ke arah terbentuknya civil society yang antara lain mensyaratkan supremasi sipil. Sehingga kontrol demokratis dari masyarakat kepada militer tetap terjaga, agar tidak lagi terulang berlakunya praetorianisme Orde Baru di masa lalu.

Terma ini berarti pengaturan, penggunaan, dan pengerahan TNI pada tataran kebijakan tinggi (nasional) harus melalui proses politik yang sewajarnya dikelola kaum sipil. Namun, aspek-aspek taktis dan teknis-militer tentu merupakan urusan internal TNI sebagaimana kebiasaan dan ketentuan militer universal.

Mungkin relevan untuk mengutip Samuel S Huntington⁵¹ dengan formula “kontrol sipil obyektif” (objective civilian control). Terminologi ini mengandung makna: pertama, profesionalisme militer yang tinggi dan pengakuan dari pejabat militer akan batas profesionalisme yang menjadi bidang mereka. Kedua, subordinasi yang efektif dari militer kepada pemimpin politik yang membuat keputusan pokok tentang kebijakan luar negeri dan militer. Ketiga, pengakuan dan persetujuan dari pihak pemimpin politik atas kewenangan profesional dan otonomi bagi militer. Keempat, minimalisasi inter-

vensi militer dalam politik dan minimalisasi intervensi politik dalam militer. Dalam konteks ini, hubungan sipil-militer di sebuah negara demokrasi dapat dikelola dengan baik manakala nilai-nilai profesionalisme militer dikedepan-kan dan kontrol sipil kian diterima.

Namun dalam persepsi para purnawirawan militer maupun militer aktif, pendapat Huntington dirunut lebih lanjut, dalam mana masa depan perkembangan hubungan sipil-militer sebagian besar tergantung tindakan pemimpin sipil dalam pemerintahan yang demokratis. Problem serius akan muncul di negara yang institusi demokrasi dan pemimpinnya tidak mampu meningkatkan perkembangan ekonomi serta menegakkan hukum dan ketertiban. Menurut Huntington, di negara semacam ini politisi sipil amat mungkin tergoda untuk menggunakan militer dalam setiap permasalahan, bahkan demi ambisi politik mereka.

Karena itu, Huntington menyarankan para pejabat sipil mampu menjaga keseimbangan (proporsionalitas) dalam hubungan dengan militer. Mereka tidak hanya harus bisa menahan godaan untuk mencari dukungan dari militer dalam konflik atau persaingan politik, tetapi mereka juga harus membalas respek militer kepada sipil dengan respek pula, memberi otonomi bagi militer untuk mengelola pendidikan/pelatihan dan operasinya, menunjuk dan mempromosikan pejabat militer sesuai standar dan kriteria profesional tanpa intervensi di tingkat mikro. Bagi bangsa Indonesia, dalam proses demokratisasi dengan orientasi yang benderang ke arah civil society dan supremasi sipil, segenap komponen bangsa, termasuk TNI, harus tetap berpegang pada fundamen dan patokan yang niscaya “abadi”, yakni Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan, serta keselamatan bangsa-negara sebagai konsekuensi dari amanat Proklamasi.

Dengan cara demikian, peran TNI sebagai prajurit Saptamarga tetap terjaga, dan sisa-sisa bablasan praetorianisme Orde Baru dalam tubuh militer itu bisa dikikis habis dari masa ke masa.

Bibliografi

Agung Supriyo, “Hubungan Sipil dan Militer pada pemerintahan Sipil di Indonesia 1989 – 2000,” Skripsi Sarjana, (Depok: FISIP UI, 2002).

Buku Saku, Visi, Misi dan Strategi Staf Umum Teritorial TNI-AD, 2000.

Bung Hatta, “Beladjar Ekonomi”, dalam buku Peringatan Dies Natalis III Mahasiswa FEUI, 1953.

Donald K. Emmerson (ed.), *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Endriartono Sutarto, “Militer Indonesia Menatap Masa Depan, Belajar dari Masa Lalu,” *Kompas*, 4 Oktober 2003.

Ikrar Nusa Bakti, dkk, “Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia,” Working Paper, No. 62, Januari 2009, (Oxford: Center for Research Inequality, Human Security and Ethnicity (CRISE), 2009).

Ikrar Nusa Bhakti, “Hubungan Baru Sipil-Militer”, dalam Ninok Leksono, editor, *Indonesia Abad XXI*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2000).

Darmawan Sinayangsah, “Peran Militer di era Reformasi”, makalah, 2003. James Schiller, “Development Ideology in New Order Indonesia”, Magister Thesis, (Ohio: Ohio University, 1978).

- Karl D Jackson, "Bureacratic Polity: A Theoritical Framework for Analysis of Power and Communications in Indonesia""", dalam Karl D. Jackson & Lucian W. Pye, *Political Power and Communications in Indonesia*, (Berkeley University of California Press, 1978).
- Kiki Syahnakri, "Demokratisasi dan Reformasi Internal TNI," Kompas, 4 Oktober 2003.
- M. Fadjoel Rachman, Herdi Sahrasad dan Al Chadidar, *Gerakan Mahasiswa, Rezim Tirani dan Ideologi Reformasi*, (Jakarta: Madani Press, 2000).
- Michel Serres, *Conversations on Science, Culture and Time*, (Michigan: The University of Michigan Press, 1995).
- Michel Serres, *Genesis*, (Michigan: The University of Michigan Press, 1996).
- Mohtar Mas"oed, "The State Reorganisation of Society under the New Order", Prisma, edisi bahasa Inggris, No. 47.
- Mohtar Maso"ed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, terjemahan Rusli Karim, (Jakarta: LP3ES, 1989).
- Nurcholish Madjid, "Mewujudkan Masyarakat Madani dalam Semangat Reformasi", Kompas, 5-6 Oktober 2001.
- Richard Robison, *Indonesia: The Rise of Capital*, (Sydney: Allen and Unwin, 1986).
- Ruth McVey (Ed.), *Southeast Asian Capitalists*, (SEAP Cornell University, 1992).
- Samuel Huntington, *Political Order in Changing Societies*, (Yale University Press, 1968).
- Sritua Arief, "Ekonomi Indonesia: Demokrasi Ekonomi atau Eksploitasi Ekonomi?", dalam *Jurnal Konfrontasi*, NO.1 1999.
- Syaiful Bahri, "Korupsi, Demokrasi, dan Reformasi", Sinar Harapan, 21 Mei 2005.
- Tajuk, No. 1, Bulan Maret 1999.
- Tempo, 16 Nopember 1998.
- Ulf Sundhaussen, *The Road to Power: Indonesian Military Politics 1945- 1967*, (Kualalumpur: Oxford University, Press, 1982)
- Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia yang Menakutkan*, (Bandung: Mizan, 2001).